

**Strategi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Kabupaten Kudus dalam Penanganan Covid-19**



Lensa Khoirul Jannah Sonida
(18321177)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi

Strategi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus dalam

Penanganan Covid-19

Disusun oleh:

Lensa Khoirul Jannah Sonida
18321177

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan
dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Tanggal: 29 Agustus 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

الإسلامية
الاستاذة
الاستاذة

Raden Narayana Mahendra Prastva S.Sos, M.A

NIDN 0520058402

الإسلامية
الاستاذة
الاستاذة

LEMBAR PENGESAHAN

Strategi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus dalam Penanganan Covid-19

Disusun oleh:

Lensa Khoirul Jannah Sonida
18321177

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 8 September 2022

Dewan Penguji:

1. Ketua: Raden Narayana Mahendra Prastya S.Sos, M.A

NIDN. 0520058402

2. Anggota: Dr. Rer. Soc, Masduki, M.A

NIDN. 0511047202

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D

NIDN: 0506038201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Lensa Khoirul Jannah Sonida

Nomor Mahasiswa : 18321177

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindakan pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya

Yogyakarta, 03 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Lensa Khoirul Jannah Sonida)

18321177

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, Alm.Ayah Busono dan Ibu Ida Royani yang tak henti berjuang untuk kebaikan saya. Kemudian kakak saya, Else Qona'ah Sonida yang selalu mendukung kebaikan saya. Lalu partner saya dalam segala hal, Fadhli Adhim yang tulus meluangkan waktunya demi menemani saya menyelesaikan skripsi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala petolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus dalam Penanganan Covid-19” sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Indonesia.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan banyak pihak, maka dari itu penulis ingin menyampain terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kasih sayang-Nya memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Alm.Ayah Busono dan Ibu Ida Royani yang tak henti berjuang untuk kebaikan saya.
3. Kakak saya, Else Qona’ah Sonida yang selalu mendukung kebaikan saya
4. Partner saya dalam segala hal, Fadhli Adhim yang tulus meluangkan waktunya demi menemani saya menyelesaikan skripsi
5. Bapak Raden Narayana Mahendra Prastya, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan serta ilmunya dalam penelitian ini.
6. Ibu Ery (Kabid Komunikasi Diskominfo Kudus) dan Bapak Rifqi (Staf Pranata Humas Kabupaten Kudus) selaku narasumber penelitian
7. Kepada teman yang tulus meminjamkan laptopnya kepada saya untuk mengerjakan skripsi pada saat laptop saya rusak yaitu Siti Nurjanah dan Santi Hendriyani
8. Kepada teman-teman yang selalu mendukung dan menemani saya yaitu Sherina, Farhana Salsabila, Anggita CP, Cindy Melyca, Atikah Luthfiah, Dhiya Putri I, Indri Cantika P, Rkyan Diandra, dan teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu
9. Seluruh jajaran staf prodi Ilmu Komunikasi UII yang membantu penulis mengurus perihal administrasi atau surat-menyurat
10. Kepada semua pihak yang tulus membantu dan menemani saya selama penelitian

Penulis harap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih secara tulus saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat, semoga Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kita semua.

Kudus, 03 Agustus 2022



Lensa Khoirul Jannah Sonida



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
Abstract.....	xii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah (dan pertanyaan penelitian)	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Penelitian Terdahulu	5
6. Kerangka Teori.....	7
7. Metode Penelitian.....	16
BAB 2.....	19
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	19
BAB 3.....	23
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	23
A. TEMUAN	23
Kebijakan Komunikasi Publik Pemkab Kudus di Masa Pandemi	23
Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Kudus	27
A) Situation Analysis/Analisis Situasi.....	27
B) Objectives/Tujuan.....	34
A) Strategy/Strategi & Tactics/Taktik	34
B) Actions/Aksi	36
D) Control/Kontrol	54

Tugas dan Fungsi Humas Pemerintah Kudus.....	57
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	66
B. Analisis SWOT	70
BAB 4.....	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penelitian	75
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Narasumber penelitian	23
Tabel 3. 2 Narasumber masyarakat Kudus	48
Tabel 3. 3 Hasil Wawancara dengan Sonia	49
Tabel 3. 4 Hasil Wawancara dengan Samudera	50
Tabel 3. 5 Hasil Wawancara dengan Endah	51
Tabel 3. 6 Hasil Wawancara dengan Nulipah.....	52
Tabel 3. 7 Hasil Wawancara dengan Riski.....	53
Tabel 3. 8 peran Diskominfo Kudus berdasarkan teori Cutlip, Center, dan Broom.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 poster kampanye penerapan protokol kesehatan.....	25
Gambar 3. 2 postingan Diskominfo Kudus terkait kampanye vaksinasi	26
Gambar 3. 3 poster PPKM darurat di akun Instagram Diskominfo Kudus.....	27
Gambar 3. 4 Informasi hoaks yang menyebutkan jumlah kasus di Kudusmencapai 2.210 sempat menggemparkan warga Kudus	29
Gambar 3. 5 informasi hoaks terkait varian India di Kudus	29
Gambar 3. 6 profil media sosial pemerintah kabupaten Kudus	31
Gambar 3. 7 postingan data sebaran Covid-19 di Instagram Pemkab Kudus Gambar	32
Gambar 3. 8 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus	32
Gambar 3. 9 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus.....	32
Gambar 3. 10 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus.....	32
Gambar 3. 11 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus.....	33
Gambar 3. 12 postingan website Diskominfo Kudus terkait tindakan PemkabKudus saat strelisisasi jalan untuk cegah Covid-19.....	37
Gambar 3. 13 postingan website Diskominfo Kudus terkait tindakan PemkabKudus saat berkoordinasi dengan RT/RW	38
Gambar 3. 14 postingan Instagram Diskominfo Kudus terkait PPKM	38
Gambar 3. 15 postingan informasi larangan mudik yang dibagikan di akunInstagram Diskominfo Kudus	39
Gambar 3. 16 postingan video masyarakat Kudus yang telah divaksin dibagiandi Instagram Diskominfo Kudus beserta tanggapan Diskominfo terkait komentar yang masuk	40
Gambar 3. 17 postingan Instagram Diskominfo terkait informasi vaksin dalambentuk video	41
Gambar 3. 18 tanggapan Diskominfo terhadap komentar yang masuk padapostingan video vaksinasi.....	41
Gambar 3. 19 poster himbauan pemerintah pusat	43
Gambar 3. 20 poster himbauan pemerintah kabupaten Kudus.....	43
Gambar 3. 21 postingan Twitter Diskominfo Kudus yang terpisah dalam thread	44
Gambar 3. 22 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait PPKM Mikro.....	45
Gambar 3. 23 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait kerjasama denganTNI dan Polri melakukan kampanye keliling pencegahan virus Covid-19 dan penyemprotan disinfektan	46
Gambar 3. 24 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait kerjasama denganTNI dan Polri melakukan kampanye keliling pencegahan virus Covid-19 dan penyemprotan disinfektan	46
Gambar 3. 25 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait pemberlakuanPPKM Darurat Jawa- Bali	47
Gambar 3. 26 postingan Antaranews Jateng menginformasikan kenaikanketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan	55
Gambar 3. 27 postingan Harian Bhirawa News menginformasikan turunnyaBOR menandakan kasus Covid-19 di Kudus melandai drastis.....	55
Gambar 3. 28 postingan Antaranews Jateng menginformasikan peningkatanvaksin di Kudus	56
Gambar 3. 29 contoh kegiatan jumpa pers Pemkab Kudus terkait perkembanganterakhir penanganan Covid-19.....	59

ABSTRAK

Kasus Covid-19 di Indonesia muncul sejak bulan Februari 2020. Dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, diwarnai berbagai macam kendala komunikasi pemerintah. Berbagai kritikan ditujukan kepada pemerintah karena dianggap tidak serius dalam merespon pandemi Covid-19. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sempat menjadi perhatian negara pada bulan Juni 2021 karena kasus lonjakan Covid-19 yang sangat drastis sehingga memasuki zona hitam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang abai protokol kesehatan terutama saat tradisi Anjangsana di momen lebaran. Bahkan, sejumlah rumah sakit di Kudus sempat mengalami kekurangan tenaga kesehatan akibat lonjakan pasien Covid-19 termasuk tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19. Merespon peristiwa krisis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus tergolong tanggap dalam menangani lonjakan Covid-19 di Kudus. Turunnya lonjakan Covid-19 bisa tercapai karena kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, POLRI, serta masyarakat Kudus sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui strategi komunikasi publik apa yang dijalankan Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19 di Kudus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pertama, wawancara kepada Kabid Komunikasi Diskominfo Kudus, Staf Pranata Humas Diskominfo Kudus, serta masyarakat Kudus. Kedua, observasi terhadap kegiatan komunikasi publik Diskominfo Kudus dalam menangani COvid-19. Ketiga, studi pustaka dengan mencari referensi dari buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel beserta lampiran peraturan atau kebijakan resmi pemerintah Kudus. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo Kudus yang pertama, sosialisasi/kampanye serta keterbukaan informasi terkait Covid-19 yang disebarakan melalui media sosial resmi Diskominfo Kudus dan Pemerintah Kabupaten Kudus. Kedua, aktivitas patroli lingkungan ke desa-desa guna menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sosial media. Ketiga, melakukan pemasangan baliho dan spanduk dengan pesan terkait kampanye protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 di beberapa titik strategis. Keempat, melakukan siaran pers.

Kata kunci: Strategi komunikasi publik, Diskominfo, Covid-19

Abstract

The case of Covid-19 in Indonesia has emerged since February 2020. In handling Covid-19 in Indonesia, there are various kinds of government communication obstacles. Various criticisms were directed at the government for not being serious in responding to the Covid-19 pandemic. Kudus Regency, Central Java had become the state's attention in June 2021 because of the very drastic spike in Covid-19 cases that entered the black zone. This is because people ignore health protocols, especially during the Anjangsana tradition at the moment of Eid. In fact, a number of hospitals in Kudus had experienced a shortage of health workers due to the surge in Covid-19 patients, including health workers exposed to Covid-19. Responding to the crisis, the Kudus Regency Government is quite responsive in dealing with the Covid-19 spike in Kudus. The decline in the Covid-19 spike could be achieved due to good cooperation and communication between the central government, provincial government, district government, TNI, POLRI, and the Kudus community itself. The purpose of this study is to find out what public communication strategy is being carried out by the Kudus Regency Communication and Information Office in handling Covid-19 in Kudus. The data collection techniques used were first, interviews with the Head of

Communications at the Communication and Information Office of Kudus, the staff of the Public Relations Office of the Diskominfo Kudus, and the Kudus community. Second, observing the public communication activities of the Kudus Diskominfo in dealing with COVID-19. Third, literature study by looking for references from books, journals, scientific papers, articles and attachments to official regulations or policies of the Kudus government. The results of this study found that the public communication strategy carried out by the first Kudus Diskominfo was socialization/campaigns and information disclosure related to Covid-19 which was disseminated through the official social media of the Kudus Diskominfo and the Kudus Regency Government. Second, environmental patrol activities to villages to reach people who do not have access to social media. Third, install billboards and banners with messages related to the health protocol campaign to break the chain of transmission of the Covid-19 virus at several strategic points. Fourth, do press releases.

Keywords: Public communication strategy, Diskominfo, Covid-19



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus Covid-19 di Indonesia muncul sejak bulan Februari 2020. Dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, diwarnai berbagai macam kendala komunikasi pemerintah. Seperti pada saat Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi respon pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 hanya sekedar antisipasi kepanikan masyarakat, namun tidak ada kerja nyata untuk melindungi masyarakat. Setelah ditemukan masyarakat Indonesia yang positif Covid-19, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemerintah tergegap-gagap sehingga terjadi berbagai kekeliruan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka menilai koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lemah serta miskomunikasi antara Kemenkes dengan instansi lainnya terlihat saat terjadi pelanggaran hak privasi pasien pertama Covid-19 di Indonesia. **(Koalisi Masyarakat Sipil Beber Kegagapan Pemerintah Tangani Corona, dalam jpn.com, 13 Maret 2020, <https://www.jpnn.com/news/koalisi-masyarakat-sipil-beber-kegagapan-pemerintah-tangani-corona>)**

Dalam mengatasi disinformasi terkait Covid-19, pemerintah pusat membentuk website www.covid19.go.id untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat akan informasi resmi penanganan Covid-19. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh pemerintah daerah dengan membuat website resmi pemerintah daerah sebagai sumber informasi akurat terkait Covid-19 dalam aktivitas komunikasi publik. Strategi tersebut merupakan implementasi dari *government digital public relations*/hubungan masyarakat digital pemerintah.

Dalam jurnal Sosial & Budaya Syar'i yang ditulis oleh Zahrotunnimah tahun 2020 mengenai langkah pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 menunjukkan hasil bahwa pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi

komunikasi publik di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan teknik redundancy, edukatif, persuasif, canalizing, koersif dan informatif dalam mengelola informasi berupa himbuan dan instruksi kepada masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun, teknik koersif belum diterapkan oleh pemerintah daerah berupa pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar kebijakan Covid-19. Peran pemerintah pusat juga belum maksimal dalam mengaplikasikan strategi komunikasi yang komprehensif kepada pemerintah daerah. Hal tersebut karena instruksi dari pemerintah pusat dianggap lambat dalam menangani pandemi Covid-19.

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sempat menjadi perhatian negara pada bulan Juni 2021 karena kasus lonjakan Covid-19 yang sangat drastis sehingga memasuki zona hitam. Melansir data dari detik.com, Satgas Covid-19 pada Rabu, 9 Juni 2021 menuturkan bahwa Kudus mengalami peningkatan kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia dalam waktu tiga minggu setelah libur lebaran. Penambahan kasus terjadi sebesar 7.594 persen. Menurut Bupati Kudus, HM Hartopo, faktor utama Kudus mengalami lonjakan besar-besaran adalah masyarakat yang abai protokol kesehatan karena sudah divaksin. Selain itu, Kudus sebagai kota religi memiliki tradisi Anjongsana, yaitu silaturahmi (berkunjung tatap muka) saat momen lebaran. Dua faktor tersebut menimbulkan potensi yang luar biasa lonjakan kasus di Kudus.

Berdasarkan data dari detiknews.com, usai perayaan lebaran Kudus menjadi satu-satunya zona merah di pulau Jawa dan menjadi sorotan media. Hanya dalam waktu seminggu, kasus Covid-19 di Kudus melonjak hingga 30 kali lipat dan 42 desa masuk zona merah. Berdasarkan data per 2 Juni 2021, sejumlah 196 tenaga medis terpapar Covid-19. Akibatnya, tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di Kudus sempat mengalami kekurangan pada saat itu. Data lainnya yakni 298 warga positif dan menjalani perawatan di rumah sakit, 972 orang isolasi mandiri, 626 meninggal dunia, dan 5.712 orang pasien sembuh (<https://news.detik.com/kolom/d-5608266/refleksi-atas-fenomena-covid-19-di-kudus>) . Dikutip dari dari cnbcindonesia.com, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kudus, Ahmad Syaifuddin menjelaskan bahwa faktor penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Kudus yakni masyarakat yang berkerumun selama Ramadhan. Selain itu, ia

menilai pemerintah daerah lambat dalam menjalankan operasi yustisi protokol kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kudus tergolong tanggap dalam merespon lonjakan Covid-19 di Kudus yang sempat memprihatinkan. Turunnya lonjakan Covid-19 bisa tercapai karena komunikasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, POLRI, pihak pengusaha, serta masyarakat Kudus sendiri. Berdasarkan data dari beritasatu.com (28/7/2021), *Bed Occupancy Rate (BOR)* atau tingkat keterisian tempat tidur Covid-19 menjadi 15% sangat jauh dari awal Juni lalu sebesar 96%. Pemerintah resmi mengganti status zona hitam pada kabupaten Kudus menjadi zona orange.

Dalam menangani pandemi Covid-19 di Kudus, sangat penting untuk memperhatikan komunikasi publik pemerintah. Komunikasi publik pemerintah adalah proses penyampaian program, gagasan dan ide pemerintah kepada khalayak dalam menangani krisis Covid-19 (Moenawar 2020). Tujuan dari adanya pengelolaan komunikasi publik pemerintah Kudus ialah mempercepat penyampaian informasi, mengumpulkan aspirasi publik, diseminasi program, tugas dan kebijakan pemerintah. Komunikasi publik juga membutuhkan peran komunikator yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Karena daya tarik tertentu dalam hal ini komunikator dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang diterima (Mulyana, 2016:82). Dalam hal penanggulangan Covid-19, maka komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi selain pemerintah ialah tenaga medis karena memiliki keahlian dalam profesi yang dimiliki dalam bidang kesehatan.

Penulis memilih Diskominfo Kudus sebagai subyek penelitian dikarenakan berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus BAB 2 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Dalam peraturan tersebut, menjelaskan struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang komunikasi, bidang informatika, kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana

teknis daerah. Dalam bidang komunikasi, menyelenggarakan fungsi terkait komunikasi publik, diantaranya pengorganisasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik; pelayanan informasi publik; pengelolaan media komunikasi publik; pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah; penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik; menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah; serta menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat. Maka dari itu, penulis memilih Diskominfo Kudus karena lembaga tersebut yang melaksanakan tugas komunikasi publik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian penulis yang ingin mengetahui strategi komunikasi publik selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus

2. Rumusan Masalah (dan pertanyaan penelitian)

Subjek penelitian merupakan Diskominfo Kabupaten Kudus.

Pertanyaan penelitian : Bagaimana strategi komunikasi publik oleh Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19 di Kudus ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui strategi komunikasi publik apa yang dijalankan Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid- 19 di Kudus

4. Manfaat Penelitian

- Manfaat Praktis
 - a. Menjelaskan manfaat strategi komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19
 - b. Mendeskripsikan penerapan dan pengolahan strategi komunikasi publik juga menjadi rujukan untuk Pemerintah Kabupaten lain dalam menaikkan strategi komunikasi publik
- Manfaat Akademis
 - a. Sebagai bahan pembelajaran, referensi serta meningkatkan kajian ilmu strategi komunikasi publik

b. Sebagai model untuk akademisi yang menekuni strategi komunikasi publik

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama berjudul Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado dalam Penanganan Covid-19. Penelitian yang ditulis oleh Cristian dkk pada tahun 2021 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota Manado melakukan komunikasi publik dalam menangani Covid-19 menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dari segi keterbukaan adalah Pemkot Manado telah berupaya memberikan transparansi informasi kepada masyarakat, namun tantangan dalam komunikasi publik yang dilakukan adalah rendahnya kepercayaan masyarakat kota Manado karena faktor banyaknya informasi yang beredar di media terkait Covid-19 beserta penanganannya. Selain itu, Pemkot Manado juga terbatas dalam sarana, prasarana dan SDM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menjelaskan komunikasi Pemkot Manado dalam penanganan Covid-19, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai strategi komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19.

Penelitian kedua berjudul Peranan PR dalam Sosialisasi Program Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi yang ditulis oleh Euis dkk pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan narasumber yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Humas Pemkot Bekasi telah menjalankan perannya sesuai teori Cutlip & Broom sebagaimana mestinya. Humas Pemkot Bekasi harus terus menjalankan komunikasi publik mengkampanyekan vaksinasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menjelaskan peran humas Pemkot Bekasi dalam sosialisasi vaksin Covid-19, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai strategi komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19.

Penelitian ketiga berjudul Strategi Komunikasi Humas Jabar Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian yang ditulis oleh Evi Novianti dkk tahun 2020 ini dilakukan guna mengidentifikasi strategi Humas Jabar saat pandemi Covid-19, selain itu juga mengetahui peran Gubernur Jabar dalam menunjukkan citra pemerintah provinsi melalui humas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dan primer. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara terhadap Humas Pemda Provinsi Jabar. Sementara data sekunder diperoleh melalui media sosial, penelitian

terdahulu, situs web, dan dokumen kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, strategi komunikasi oleh Humas Jawa Barat yakni fokus pada konten dan media distribusi. Peran Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memiliki efek yang kuat terhadap integritas informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga mampu memberikan citra positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perbedaan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi humas Jabar di masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai strategi komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Tarra Nur Azizah Sulistiani dan Lina Sinatra Wijaya tahun 2021 berjudul Strategi Komunikasi Eksternal PR Pemerintah Kota Salatiga di Masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan observasi. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan PR Pemkot Salatiga adalah memanfaatkan media massa, media sosial, baliho, siaran keliling, spanduk, videotron, pusat informasi. PR Pemkot Salatiga juga melakukan empat langkah strategi komunikasi, yakni: menyusun narasi, mengenal khalayak, menentukan media yang akan digunakan, dan menentukan tema/topik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis yakni, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang dijalankan PR Pemkot Salatiga di masa pandemi Covid-19 serta langkah yang dilakukan. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi publik apa yang dijalankan Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19 di Kudus.

Penelitian kelima dalam jurnal yang ditulis oleh Sofian Arissaputra berjudul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik terkait dengan Penanggulangan Covid-19 (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun Instagram Dinas Kominfo Bangka Belitung). Dalam penelitian tersebut membahas komunikasi publik pemerintah Bangka Belitung dalam memberikan edukasi dan informasi terkait Covid-19 melalui akun Instagram Diskominfo Bangka Belitung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah Bangka Belitung dalam penanganan Covid-19 melalui akun Instagram Diskominfo Bangka Belitung sangat bermanfaat untuk masyarakat Bangka Belitung. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis yakni, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui komunikasi publik pemerintah Bangka Belitung dalam memberikan edukasi

dan informasi terkait Covid-19 melalui akun Instagram Diskominfo Bangka Belitung. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi publik apa yang dijalankan Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19 di Kudus.

6. Kerangka Teori

- Komunikasi Publik

Menurut Muhammad Arni dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Organisasi* menuliskan bahwa komunikasi publik adalah proses pertukaran pesan baik dengan sejumlah orang di dalam maupun diluar organisasi menggunakan media ataupun tatap muka.

Paul Nelson dan Judy Pearson (2009) mendefinisikan komunikasi publik adalah proses memanfaatkan pesan guna menciptakan keserasian makna dalam sebuah kondisi disaat seorang sumber menyebarkan pesan kepada sejumlah target penerima pesan yang memberikan *feedback*/umpan balik berupa komunikasi nonverbal atau pesan.

Berdasarkan pengertian diatas, komunikasi publik menekankan pada seseorang yang memiliki tanggungjawab dalam proses penyampaian pesan/informasi kepada khalayak. Komunikasi publik merujuk pada suatu kegiatan kampanye komunikasi yang menggunakan strategi komunikasi dan teori agar dapat memengaruhi khalayak atau target penerima pesan (Bahan Ajar Teknik Komunikasi Publik, 2020).

Dalam buku berjudul “Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik”, menyebutkan ciri-ciri komunikasi publik yaitu komunikasi interpersonal (pribadi) serta interaksi antara penerima dan sumber sangat terbatas karena jumlah khalayak yang relatif besar. Sementara tipe komunikasi publik meliputi seminar, kampanye, rapat, sosialisasi, presentasi, pengajian, dll.

Evaluasi manajemen komunikasi publik sangat penting dilakukan di era yang membutuhkan kewaspadaan tinggi seperti saat krisis pandemi Covid-19 sekarang ini. Berdasarkan protokol komunikasi yang diteguhkan Kantor Staf Presiden, dalam menanggapi pandemi Covid-19 terdapat empat pilar komunikasi publik, diantaranya 1) ajakan agar masyarakat waspada dan tenang, 2) pengorganisasian yang baik dengan lembaga terkait, 3) kemudahan media dalam akses informasi, 4) himbauan kepada seluruh golongan masyarakat untuk cuci tangan menggunakan sabun. Komunikasi publik yang baik, selaras serta informasi yang terverifikasi dapat menekan kepanikan masyarakat di tengah krisis. Hal tersebut juga berguna untuk menghilangkan berita

hoaks atau informasi yang tidak benar.

Cangara (2008) menjelaskan bahwa peran komunikator sangat vital dalam mengoperasikan jalannya komunikasi. Menurutnya, seorang komunikator harus mempunyai *credibility* (kepercayaan) dan *attractive* (daya tarik). Dalam komunikasi pelayanan publik, pemerintah bertindak sebagai komunikator publik yang empatik karena pemerintah merupakan pengirim, sumber, atau pemrakarsa dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sikap komunikator publik yang empatik atau disebut dengan prinsip platina, menempatkan siapapun harus kita pahami perspektifnya dengan informasi yang cukup agar komunikasi yang dibangun dapat efektif tanpa melihat apa atribut sosialnya serta menghilangkan sikap apatis (Depdagri-LAN, 2007:12). Dampak yang diharapkan dari proses komunikasi pelayanan publik adalah pesan/informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat dengan apa yang diterima masyarakat dapat memberikan pengaruh yang terukur dan jelas.

Sebagai upaya pengendalian dan pemulihan efek pandemi Covid-19, pemerintah mendirikan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menjalankan komunikasi publik dengan konten dan topik terkait Covid-19. Pembentukan Gugus Tugas bertujuan untuk merangsang masyarakat agar merubah perilaku secara komprehensif dan sistematis untuk memotong roda penyebaran virus Covid-19 melalui pelayanan informasi dan komunikasi publik (PIKP). Pemerintah menggandeng berbagai *stakeholder*/pemangku kepentingan baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (media, komunitas, pengusaha, kalangan akademisi) untuk berkolaborasi merumuskan dan menyebarluaskan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19, serta mengendalikan hoaks virus Covid-19 yang beredar di masyarakat melalui pendekatan terintegrasi dengan kolaborasi pentahelix.

Dikutip dari buku Strategi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Publik Pemerintah terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Prof.Dr. Widodo Muktiyo, tujuan utama komunikasi publik dalam penanganan Covid-19 diatur dalam kerangka Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) atau *Behavioral Change Communication*, yakni komunikasi publik yang komprehensif, sistematis, dan repetitif dilaksanakan guna merubah perilaku dan kebiasaan dari publik sasaran. Melalui KPP ini, tujuan utama komunikasi publik dalam penanganan Covid-19 adalah bagaimana cara untuk merubah masyarakat agar berperilaku sehat dan mengikuti anjuran pemerintah. Pada tingkat kognitif, tujuan dari penyajian pesan melalui Komunikasi Perubahan Perilaku

adalah :

- 1) Menjadikan masyarakat menjadi tenang serta memahami apa yang harus mereka lakukan di lingkungan
- 2) Menciptakan persepsi masyarakat bahwa pemerintah ikut andil dan tanggap dalam mengontrol kondisi krisis yang berlangsung

Dikutip dari buku Strategi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Publik Pemerintah terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Prof.Dr. Widodo Muktiyo, Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) merupakan pendekatan komunikasi guna melakukan promosi kesehatan yang membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai perilaku publik untuk menyusun komunikasi yang persuasif. KPP dipandang sebagai turunan dari kampanye/pemasaran sosial, sehingga banyak strategi kampanye/pemasaran/komunikasi sosial yang dapat digunakan. Banyak strategi yang dapat dipakai dalam melakukan KPP. Strategi yang dipakai dalam melaksanakan komunikasi penanganan Covid-19 adalah *Ideational Communication Model/Model Komunikasi Ideal*.

Ideasi mengacu terhadap bagaimana cara berperilaku atau berpikir baru dipublikasikan melalui komunitas serta komunikasi antar individu dan kelompok. Pola komunikasi dalam strategi ideas ini adalah :

- 1) Instruksional. Ini adalah tahap mengkomunikasikan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam mengenali Covid-19 serta cara menjaga diri, lingkungan dan keluarganya. Diharapkan terjadi transformasi perilaku setelah masyarakat memahami alasan mereka harus merubah perilaku dan menekankan bahwa mereka sanggup merubah perilaku.
- 2) Direksional, yakni membimbing masyarakat melalui komunikasi satu arah seperti pelatihan bagi *volunteer* yang membantu mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi Covid-19.
- 3) Non directive. Berupaya melibatkan masyarakat (dibantu sukarelawan atau petugas terkait) agar ikut serta dalam interaksi dan dialog baik langsung maupun tidak langsung untuk merubah perilaku.
- 4) Bersifat publik, baik dalam pembuatan regulasi, advokasi, maupun penegakannya. Contohnya adalah regulasi wajib mengenakan masker di tempat umum dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Frank Jefkins yang dikutip oleh (Fajar, 2009 : 56-57), publik adalah sekelompok orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun

eksternal. Sedangkan menurut Ummi Abdurrachman yang dikutip oleh (Fajar, 2009:56) menjelaskan publik sebagai sekelompok individu yang mempunyai kepentingan dan minat yang sama pada hal yang sama, publik tersebar dimanapun, tidak saling mengenal, bisa kecil atau besar.

Berdasarkan buku *Effective Public Relations* dari Cutlip, Center dan Broom menjelaskan empat tipe publik, yakni :

- a) *All-issue publics*, bersikap aktif dalam semua isu
- b) *Apathetic public*, tidak memerhatikan atau tidak aktif terhadap semua isu
- c) *Single-issue publics*, aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas
- d) *Hot-issue publics*, baru aktif setelah semua media mengekspos hampir semua orang dan isu menjadi topik sosial yang diperbincangkan secara luas.

Berdasarkan buku *Effective Public Relations* dari Cutlip, Center dan Broom menjelaskan tiga faktor yang menggerakkan publik laten menjadi publik aktif, yakni :

- a) Pengenalan problem, merepresentasikan sejauh mana orang menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam suatu situasi, dan karenanya mereka tahu bahwa mereka butuh informasi.
- b) Pengenalan batas-batas, merepresentasikan sejauh mana orang memandang diri mereka dibatasi oleh faktor eksternal, dan sejauh mana mereka memandang bahwa mereka dapat berbuat sesuatu untuk situasi itu. Jika orang mengira bahwa mereka bisa berbuat sesuatu atau bisa memengaruhi situasi problem, mereka akan mencari informasi untuk merencanakan suatu tindakan.
- c) Level keterlibatan, merepresentasikan sejauh mana orang memandang dirinya terlibat dan dipengaruhi oleh situasi. Dengan kata lain, semakin mereka memandang diri terkait dengan situasi, semakin mungkin mereka akan mengomunikasikan hal ini.

- Strategi Komunikasi Publik

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), strategi komunikasi adalah taktik dan pendekatan komunikasi kepada publik atau masyarakat sasaran serta terkait isu program dan kebijakan tertentu secara efisien dan efektif. Secara umum, tujuan dari komunikasi adalah untuk menguatkan pemahaman, memelihara penerimaan, serta memotivasi perilaku tertentu. Terdapat enam hal yang perlu diperhatikan dalam strategi komunikasi publik yang disingkat menjadi SOSTAC, yakni *Situation Analysis/analisis situasi* (bagaimana situasi terkini yang dihadapi), *Objectives/tujuan* (apa saja yang ingin dicapai dari rangkaian aktivitas komunikasi publik), *Strategy/strategi* (bagaimana mencapai tujuan komunikasi publik), *Tactics/taktik* (bagaimana sebenarnya dapat

mencapai tujuan komunikasi publik), **Actions/aksi** (rincian taktik atau aksi), **Control/kontrol** (bagaimana mengukur efektivitas komunikasi publik).

Situation Analysis/analisis situasi, yakni analisis situasi untuk memahami kondisi eksternal dan internal lembaga terkait komunikasi yang akan dijalankan. Tiga langkah dalam analisis situasi meliputi: pertama, identifikasi isu yang merebak dalam kurun waktu tertentu. Kedua, menyimpulkan permasalahan komunikasi berdasarkan identifikasi. Ketiga, pendekatan solusi untuk menanggapi situasi yang sedang terjadi.

Objectives/tujuan, pelaksanaan strategi komunikasi mempunyai maksud tertentu. Secara umum, strategi komunikasi dilakukan untuk memperluas informasi sehingga dapat menumbuhkan pemahaman sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku. Tujuan komunikasi publik harus dibentuk secara terstruktur dan jelas.

Strategy/strategi, menguraikan gambaran umum khalayak, media komunikasi publik dan strategi konten dalam periode tertentu. Strategi meliputi durasi pelaksanaan komunikasi publik, materi konten yang akan dibagikan kepada khalayak terkait kebijakan (strategi konten), sasaran publik secara spesifik, serta media apa yang akan digunakan (strategi media). Dalam merancang strategi konten, difokuskan kepada bagaimana pesan dikonstruksi dan dikemas. Materi konten berisi substansi pesan, konstruksi pesan, dan pengemasan pesan. Pesan yang disampaikan bersifat informatif, edukatif, persuasif, inspiratif, promotif. Sedangkan efek yang diharapkan dari diseminasi materi konten ialah mengetahui, memahami, dan partisipasi. Sementara itu, dalam merancang strategi media (diseminasi) dirumuskan dengan mempertimbangkan penggunaan media komunikasi publik secara efisien dan efektif. Terdapat enam jenis media komunikasi publik meliputi: media cetak, media penyiaran, media daring, media sosial, media luar ruang, dan komunikasi tatap muka.

Tactics/taktik, yakni uraian yang menjelaskan turunan atau rincian dari strategi berupa jenis materi konten dan media komunikasi publik serta khalayak sasaran secara spesifik sesuai dengan materi konten dan media komunikasi publik yang digunakan. Taktik meliputi rincian pesan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan komunikasi; varian media yang digunakan baik itu *paid*/media berbayar, *owned*/media milik merek, maupun *earned media*/media yang diterima; khalayak sasaran yang dituju dengan penggunaan media.

Actions/aksi, yakni uraian yang menjelaskan aktivitas komunikasi publik yang

akan dilakukan dari waktu ke waktu dalam satu periode tertentu (dilengkapi waktu pelaksanaan). Aksi meliputi: dalam satu periode tergambar penggunaan media komunikasi publik secara spesifik; prioritas program dan ketersediaan anggaran; adanya kejelasan kapan waktu tayang atau waktu pemuatan konten.

Control/kontrol, yakni uraian yang menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi keseluruhan aktivitas komunikasi selama periode tertentu (menyertakan metode evaluasi yang digunakan). Dalam kontrol meliputi: memberikan penilaian kuantitatif terhadap aktivitas komunikasi publik serta menyajikan penilaian kualitatif terhadap aktivitas komunikasi publik.

Strategi komunikasi publik harusnya menggunakan cara-cara yang menyesuaikan era *Post Truth* yang ditandai dengan tiga hal utama, yakni yang pertama, bukti, fakta atau kebenaran menjadi tidak begitu penting selagi pemikiran, cerita dan narasi diterima berdasarkan kesesuaian keyakinan, pikiran dan pandangan. Kedua, berkembangnya cara-cara yang menyeleweng dan menghasut masyarakat agar mempercayainya berdasarkan keyakinan yang diluarnalar dan data. Ketiga, masyarakat adalah produsen, distributor, sekaligus konsumen informasi melalui pesatnya sosial media. Ketiga faktor tersebut selanjutnya dapat dideskripsikan dalam strategi penanganan Covid-19 guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani Covid-19.

Luasnya wilayah Indonesia yang terpisah oleh pulau serta keberagamannya membuat penyampaian informasi yang diberikan kepada masyarakat mendapat respon yang berbeda-beda serta akses arus informasi yang tidak merata. Tantangan dalam penyebaran informasi dalam penanganan Covid-19 di masyarakat dikelompokkan oleh Kathryn H Jacobsen Emily K Vraga (2020) meliputi: Informasi yang terlalu banyak, ketidakpastian informasi yang beredar, serta *misinformation* (penyebaran informasi yang salah).

- Humas Pemerintah

Dalam jurnal ilmu komunikasi tahun 2020 yang ditulis oleh Asril Darma dan Suyanto menyebutkan komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antarmanusia dalam konteks organisasi pemerintah. Komunikasi pemerintahan dapat disebut juga dengan komunikasi politik. Menurut Maswadi Rauf sebagai seorang pakar politik, komunikasi politik merupakan objek kajian ilmu politik karena informasi yang disampaikan bercirikan politik, yakni berhubungan dengan kegiatan komunikator

sebagai pemain politik, pemerintahan, serta kekuasaan politik negara. Tujuan utama komunikasi politik ialah membangun pemahaman politik yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat (Firmanzah, 2007:242).

Di zaman serba digital sekarang ini, komunikasi politik atau komunikasi pemerintahan sangat penting dilakukan. Masyarakat dengan budaya baru sekarang ini tidak dapat dengan mudah menerima kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tanpa mereka mendapatkan informasi akan manfaat yang bisa menjadi akselerator untuk aktivitas yang dijelankannya. Maka dari itu, komunikasi pemerintahan penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahwa regulasi yang diputuskan pemerintah hanya akan berhasil apabila terdapat partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

Definisi humas pemerintah memiliki definisi yang sama dengan humas pada umumnya. Cutlip dalam *Effective Public Relations* (2009:266) menjelaskan humas pemerintah adalah suatu kewajiban fungsional sebagai penyedia informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga humas pemerintah menjadi pintu gerbang secara harmonis dan berkelanjutan antara masyarakat dengan pemerintah karena pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat. Kemenkominfo membentuk program Tenaga Humas Pemerintah (THP) berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. THP memiliki tugas untuk menyalurkan dan berkomunikasi dengan publik. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa THP juga memiliki tugas untuk menampung aspirasi publik berdasarkan program atau kebijakan pemerintah. THP berfungsi sebagai *agent of change*/agen perubahan yang dibentuk di setiap lembaga/kementerian guna menegaskan kendali komunikasi pemerintah tetap selaras dalam sebuah narasi tunggal.

Tugas-tugas dari THP meliputi: merencanakan materi informasi untuk keperluan komunikasi kepada pekerja media; mendukung pengendalian konten dan penyertaan sosial media lembaga dan menteri; mengatur alur komunikasi dari menteri kepada *stakeholder*/pemangku kepentingan eksternal dan internal; merumuskan, menganalisis dan mengidentifikasi isu strategis lembaga; menciptakan usulan pelaksanaan dan perencanaan program komunikasi atas promosi peraturan prioritas lembaga/kementerian serta informasi penting lainnya sesuai keperluan pengelolaan komunikasi publik.

Peran THP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menurut Cutlip, Center dan Broom (2009) ada empat, yakni a) ahli komunikasi tanpa ada kontribusi yang signifikan dalam penciptaan ketetapan manajemen dan perencanaan strategis; b) ahli perumus yang memiliki tugas dalam mendeskripsikan masalah, menumbuhkan program, dan bertanggung jawab penuh atas praktiknya; c) penyedia komunikasi yang memiliki tugas sebagai pendengar yang responsif dan menjadi mediator, interpreter, serta perantara antara publik dengan organisasi; d) fasilitator pemecah masalah yang bekerja sama dengan manajer guna menjelaskan dan mencari solusi, serta sebagai anggota dari tim perencanaan strategis dari awal hingga evaluasi program.

Adapun secara garis besar tujuan Humas Pemerintah menyangkut tiga hal menurut Betty Wahyu Nilasari (2012:7) dalam buku yang ia tulis berjudul Humas Pemerintah, yakni :

- a) Citra dan Reputasi : Tugas seorang humas tidak lepas dari citra dan reputasi, ini berarti asumsi bahwa citra yang baik akan berpengaruh dengan tingginya jalur publik terhadap hasil dari organisasi tersebut
- b) Jembatan komunikasi : humas sebagai mediator dan komunikator dalam pengutaraan aspirasi kepada pemerintah
- c) *Mutual benefit relationship*/hubungan saling menguntungkan : humas harus memastikan bahwa operasi pemerintah mempunyai tujuan baik dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dengan menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara publik dan pemerintah.

Proses komunikasi humas pemerintah dalam berkomunikasi dengan publiknya antara lain a) komunikasi internal, yakni proses komunikasi antara publik internal dengan manajemen organisasi. Berusaha menciptakan hubungan yang selaras di organisasi dalam menciptakan produktivitas kerja; b) komunikasi eksternal, yakni proses komunikasi antara organisasi dengan publik eksternal, meliputi masyarakat, penganut, penyalur, kelompok publik, pelanggan, dan pemasok (Nilasari, 2012:43-44). Black dalam Saputra & Nasrullah (2011:55) menjelaskan dalam bukunya Teori dan Praktik Public Relations di Era Cyber 2000 bahwa humas pemerintah dibagi dua, yakni :

1) Humas pemerintah pusat

Humas pemerintah pusat biasanya terdapat di departemen serta badan yang terdapat dalam kekuasaan pemerintah pusat. Tugas humas pemerintah pusat yaitu: a) menyebarkan informasi mengenai perencanaan, hasil, dan kebijakan yangtelah dicapai

pemerintah; b) membimbing dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi, perundang-undangan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan rakyat sehari-hari

2) Humas pemerintah daerah

Pada dasarnya, humas pemerintah daerah sama dengan humas pemerintah pusat dalam rangka pengorganisasian dan mekanisme kerja. Hal yang berbeda hanya dalam ruang lingkup.

Menurut Moore dalam Suprawoto (2018:88) menjelaskan bahwa peran humas pemerintah pada dasarnya berasas terhadap dua fakta yang harus diperhatikan, yakni a) masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Pemerintah bertanggung jawab memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan; b) Pemerintah harus menerima masukan dari masyarakat mengenai permasalahan yang ada untuk mendapatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Humas pemerintah dapat terbilang efektif jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki informasi yang lengkap mengenai organisasi
- 2) Puncak pimpinan operasional harus bertanggung jawab mengenai kehumasan
- 3) Manajemen harus memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil pejabat humas
- 4) Terdapat sistem *accountability* terhadap kinerja pejabat humas. Humas pemerintah haruslah lebih memikirkan objektivitas jangka panjang dibandingkan dengan objektivitas jangka pendek.

Aktivitas humas pemerintah sebagian besar keseluruhan sama, yakni : penyusunan pidato, membuat kliping berita, pendokumentasian dan peliputan aktivitas pimpinan, periklanan di media massa, penyebarluasan informasi melalui jumpa pers, menulis press release, sosialisasi, melayani pers dan penerbitan majalah. Selain itu, humas juga melaksanakan aktivitas siaran keliling dalam ruang lingkup pemerintah daerah (Sari, 2012:85). Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Santi Nawanti berjudul “Efektivitas Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah” menyebutkan faktor penghambat dan pendukung humas pemerintah dalam penyebarluasan informasi. Faktor pendukung meliputi : 1) kemampuan komunikasi yang memadai. Humas pemerintah haruslah mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada, terlebih mengenai teknologi informasi yang semakin

pesat mengharuskan humas pemerintahan untuk tidak gagap teknologi serta harus terampil dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak memanfaatkan media; 2) kerja sama dengan media. Hubungan baik yang terjalin dengan media akan mempermudah aktivitas humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi; 3) sarana prasarana. Sarana prasarana yang memadai sangat dibutuhkan humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi seperti media serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya aktivitas. Sedangkan faktor penghambat adalah persoalan anggaran, seperti pendanaan terhadap wartawan.

7. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat dalam melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi MA, penelitian adalah upaya mendapatkan, mengkaji, serta mengembangkan fakta dalam ilmu pengetahuan. Bisa diambil kesimpulan metode penelitian adalah sebuah studi yang menjelaskan langkah pengamatan yang dilakukan secara ilmiah untuk menguji, menemukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk mengetahui makna dari permasalahan sosial (Creswell, 2009:4). Penelitian kualitatif memiliki tujuan guna menemukan kebenaran informasi atas permasalahan yang ada, membuat komparasi dan evaluasi, serta mengenali masalah sekaligus praktek yang terjadi (Rakhmat, 2007:27). Pendekatan ini berhubungan erat dengan perilaku kelompok atau masyarakat, pendapat dan sikap.

2. Subyek dan obyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Diskominfo Kabupaten Kudus yang bertugas untuk mensosialisasikan ketertiban masyarakat untuk menurunkan lonjakan kasus positif Covid-19. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu dimana peneliti menganggap narasumber memahami, mengetahui, serta memiliki keterikatan terhadap topik penelitian. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kudus dalam penanganan Covid-19.

3. Pengumpulan data

a. Jenis data

Data dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer

adalah data yang berasal dari narasumber langsung melalui wawancara, penulis melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus, Staff Pranata Humas Pemkab Kudus, dan masyarakat Kudus. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan observasi, penulis melakukan penelitian dengan mencari referensi dari buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel beserta lampiran peraturan atau kebijakan resmi pemerintah Kudus.

b. Teknik pengumpulan data

4. Wawancara

Moh Nazir (2013, hlm. 193-194) menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah proses untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab *face to face*/tatap muka antara responden dengan peneliti menggunakan *interview guide*/panduan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus, Staff Pranata Humas Pemkab Kudus, dan masyarakat Kudus. Wawancara yang dilakukan melalui aplikasi Whatsapp dan berlangsung secara tertulis via *personal message*/pesan pribadi.

Tabel narasumber Diskominfo Kabupaten Kudus

	Nama	Jabatan	Tanggal
1.	Ery Rahayu, S.Sos	Kepala Bidang Komunikasi	6 Juni 2022
2.	Rifqi Dzil Fahmi	Staf Pranata Humas	6 Juni 2022

Tabel narasumber masyarakat Kudus

	Nama	Profesi	Tanggal
1.	Sonia Navratilova	Mahasiswa	12 Juli 2022
2.	Samudera Pangestu	Freelance Fotografer	12 Juli 2022
3.	Endah Yuwana Pratiwi	Wiraswasta	12 Juli 2022
4.	Nulipah	Petani	12 Juli 2022

5.	Riski Novriansyah	Guru	12 Juli 2022
----	-------------------	------	--------------

- Observasi

Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan serta mencatat kegiatan komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kudus dalam menangani Covid-19 di Kabupaten Kudus. Dengan adanya observasi, peneliti dapat memantau kondisi lapangan dan kinerja dari Diskominfo Kudus

- Studi pustaka

Studi pustaka atau pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh kebenaran informasi melalui dokumen atau teks yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 240) dokumen yang dikumpulkan dapat berupa karya seni monumental, tulisan, maupun gambar. Penulis melakukan kegiatan studi pustaka dengan mencari referensi dari buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel beserta lampiran peraturan atau kebijakan resmi pemerintah Kudus.

5. Analisis data

Setelah memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus, Staff Pranata Humas dan masyarakat Kudus kemudian penulis melakukan analisis. Penulis melakukan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan peristiwa di lapangan dalam bentuk verbal. Analisis data kualitatif merupakan usaha penulis dalam mengklasifikasi data agar dapat dikelola menjadi informasi penting dan dapat dipelajari.

BAB 2

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dasar hukum pemerintah daerah dalam tugas pengelolaan informasi, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 345 ayat (1) berbunyi “*Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik*”. Ayat (2) berbunyi “*Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :*

- a. *Pelayanan konsultasi*
- b. *Penyuluhan kepada masyarakat*
- c. *Pengawasan internal*
- d. *Pengelolaan informasi*
- e. *Pengelolaan pengaduan masyarakat*
- f. *Pelaksanaan pelayanan*
- g. *Pelayanan publik lainnya*

Serta pasal 347 berbunyi “*Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 345 ayat (2) huruf c kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas*”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus BAB 2 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Diskominfo Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 dan merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Bidang dan Bagian di lingkungan Pemkab Kudus, yakni Dishubkominfo dengan Bagian Humas setda Kudus.

Diskominfo Kabupaten Kudus dipimpin oleh Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Uraian

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus, susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - Seksi Informasi dan Dokumentasi
 - Seksi Komunikasi Publik
4. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - Seksi Teknologi Informasi dan Persandian
 - Seksi Sistem Informasi dan Statistik
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ringkasan Tugas Jabatan

1. Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah
2. Sekretaris bertugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
 - Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan bertugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.
 - Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasandan kepegawaian di lingkup Dinas.
3. Kepala Bidang Komunikasi bertugas melakukan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pelayanan informasi publik dan dokumentasi, penyediaan konten media informasi, pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, media komunikasi publik, lembaga penyiaran publik lokal, penguatan hubungan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

- Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi, penyediaan konten media informasi, pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
 - Kepala Seksi Komunikasi Publik bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan media komunikasi publik, lembaga penyiaran publik lokal, penguatan hubungan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik
4. Kepala Bidang Informatika bertugas melakukan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta manajemen data informasi e-Government, layanan nama domain dan sub domain, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pelaksanaan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia, verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi
- Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan infrastruktur dan teknologi, layanan nama domain dan sub domain, pelaksanaan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi

- Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan manajemen data informasi e-Government, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, survei dan kompilasi produk bidangnya sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia

Alamat

Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313



BAB 3

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan hasil temuan penulis dalam sesi wawancara bersama Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi serta Staf Pranata Humas dan Informatika Kabupaten Kudus untuk penelitian penulis yang berjudul “**Strategi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus dalam Penanganan Covid-19**”, berikut adalah daftar narasumber penulis :

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1.	Ery Rahayu, S.Sos	Kepala Bidang Komunikasi	6 Juni 2022
2.	Rifqi Dzil Fahmi	Staf Pranata Humas	6 Juni 2022

Tabel 3. 1 Narasumber penelitian

	Nama	Profesi	Tanggal
1.	Sonia Navratilova	Mahasiswa	12 Juli 2022
2.	Samudera Pangestu	Freelance Fotografer	12 Juli 2022
3.	Endah Yuwana Pratiwi	Wiraswasta	12 Juli 2022
4.	Nulipah	Petani	12 Juli 2022
5.	Riski Novriansyah	Guru	12 Juli 2022

Tabel 3. 2 Narasumber penelitian

Kebijakan Komunikasi Publik Pemkab Kudus di Masa Pandemi

Paul Nelson dan Judy Pearson (2009) mendefinisikan komunikasi publik adalah

proses memanfaatkan pesan guna menciptakan keserasian makna dalam sebuah kondisi disaat seorang sumber menyebarkan pesan kepada sejumlah target penerima pesan yang memberikan *feedback* berupa komunikasi nonverbal atau pesan.

Berdasarkan pengertian diatas, komunikasi publik menekankan pada seseorang yang memiliki tanggungjawab dalam proses penyampaian pesan/informasi kepada khalayak. Komunikasi publik merujuk pada suatu kegiatan kampanye komunikasi yang menggunakan strategi komunikasi dan teori agar dapat memengaruhi khalayak atau target penerima pesan (Bahan Ajar Teknik Komunikasi Publik, 2020).

Strategi dari Diskominfo maupun pemda Kudus agar pesan yang disampaikan oleh komunikator komunikasi publik terkait Covid-19 dapat serasi adalah dengan menunjuk juru bicara yakni Bupati Kudus selaku figur utama yang selalu hadir di setiap informasi terkait penanganan Covid-19 seperti dalam himbauan pelaksanaan protokol kesehatan maupun sidak penanganan Covid-19 di lapangan. Dalam menjalankan perannya, Bupati dibantu oleh sekretaris daerah dalam urusan kebijakan administratif dan koordinasi perangkat daerah. Sementara untuk isu keagamaan, Pemkab Kudus menghadirkan tokoh agama sebagai komunikator untuk memberikan pesan-pesan seperti isu kehalalan vaksin dan menghimbau kepada jemaatnya terkait pelaksanaan ibadah di rumah ibadah selama pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Bupati Kudus selaku figur utama dan panglima dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus selalu hadir dalam setiap informasi terkait penanganan COVID-19 seperti dalam himbauan pelaksanaan protokol kesehatan, dalam informasi atas kebijakan PPKM, maupun dalam sidak penanganan COVID-19 di lapangan. Adapun Sekretaris Daerah memiliki tugas utama membantu Bupati dalam urusan kebijakan administratif dan koordinasi perangkat daerah dalam penanganan COVID-19. Tokoh agama hadir dalam pesan-pesan yang terkait dengan isu keagamaan seperti isu kehalalan vaksin, dan mengimbau kepada para jemaatnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan di rumah ibadah selama pandemi melanda”

(Wawancara Ery, 6 Juni 2022)

Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) merupakan pendekatan komunikasi guna melakukan promosi kesehatan yang membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai perilaku publik untuk menyusun komunikasi yang persuasif. Strategi yang dipakai dalam melaksanakan komunikasi penanganan Covid-19 adalah *Ideational Communication Model*. Pola komunikasi dalam strategi Ideas meliputi Instruksional,

direksional, non directive, dan bersifat publik. Dalam empat pola tersebut, Diskominfo menggunakan pendekatan instruksional yang dilakukan secara daring (media sosial) maupun luring (patroli lingkungan bersama pihak terkait). pendekatan instruksional digunakan karena dianggap sesuai dengan tugas dan fungsi dari Diskominfo Kudus. Sementara tiga pendekatan lainnya tidak digunakan oleh Diskominfo Kudus karena merupakan wewenang dari OPD lain (Dinas Kesehatan, TNI, Polri). Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis.

Dibawah ini merupakan salah satu kampanye protokol kesehatan yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Kudus di sosial media



Gambar 3. 1 poster kampanye penerapan protokol kesehatan <https://www.instagram.com/p/CRgTWfNjyIT/>

“Strategi komunikasi publik yang kami lakukan lebih bersifat instruksional, yang dilakukan secara daring (media sosial) maupun luring (patroli lingkungan bersama pihak terkait). Digunakannya pendekatan instruksional dikarenakan sifat dari pendekatan ini yang paling cocok dengan tugas dan fungsi Diskominfo Kudus. Adapun 3 pendekatan lainnya yang di dalamnya melibatkan masyarakat/sukarelawan, membuat regulasi dan melakukan penegakan atas regulasi tersebut tidak kami gunakan karena wewenang tersebut berada pada OPD lain (Dinas Kesehatan, TNI, Polri)”
(Wawancara Ery, 6 Juni 2022)

Diskominfo Kudus dalam melakukan penanganan Covid-19 mengangkat tema yang sejalan dengan pemerintah pusat terkait protokol kesehatan seperti 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) beserta turunannya yakni 5M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment). Selain itu, Diskominfo juga melakukan himbauan

terkait tidak mudik, PPKM dan informasi vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Tema yang diusung oleh Diskominfo Kudus sejalan dengan tema yang diusung oleh pemerintah pusat seperti pelaksanaan prokes 3M dan turunannya (5M dan 3T), pesan terkait PPKM, imbauan untuk tidak mudik, informasi terkait vaksinasi” (Wawancara Rifqi, 6 Juni 2022)

Dibawah ini merupakan video kampanye vaksinasi yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Kudus melalui akun Instagram resmi. Video tersebut mendapat *like/suka* sebanyak 18, 362 tayangan dan dua komentar masyarakat. Dalam postingan tersebut terdapat komentar masyarakat yang menanyakan terkait lokasi vaksinasi dan Diskominfo merespon komentar tersebut dengan memberikan informasi bahwa saat itu Kudus sedang menunggu kiriman vaksin.



Gambar 3. 2 Video Diskominfo Kudus terkait kampanye vaksinasi
<https://www.instagram.com/p/CRA0brmJB76/>

Dibawah ini merupakan poster informasi kebijakan PPKM darurat yang diposting di akun Facebook Pemkab Kudus. Postingan tersebut mendapatkan *like/suka* sebanyak 31 dan dua kali dibagikan oleh masyarakat



Gambar 3. 3 poster PPKM darurat di akun Facebook Pemkab Kudus
<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2645814649045139>

Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Kudus

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), strategi komunikasi adalah taktik dan pendekatan komunikasi kepada publik atau masyarakat sasaran serta terkait isu program dan kebijakan tertentu secara efisien dan efektif. Secara umum, tujuan dari komunikasi adalah untuk menguatkan pemahaman, memelihara penerimaan, serta memotivasi perilaku tertentu.

Penulis akan menjabarkan strategi komunikasi Pemkab Kudus dengan pola SOSTAC yang dikutip dari jurnal Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia berjudul Strategi Komunikasi Publik dalam mendukung Vaksinasi Covid-19. SOSTAC merupakan kepanjangan dari *Situation Analysis/Analisis Situasi* (bagaimana situasi terkini yang dihadapi), *Objectives/Tujuan* (apa saja yang ingin dicapai dari rangkaian aktivitas komunikasi publik), *Strategy/Strategi* (bagaimana mencapai tujuan komunikasi publik), *Tactics/Taktik* (bagaimana sebenarnya dapat mencapai tujuan komunikasi publik), *Actions/Aksi* (rincian taktik atau aksi), *Control/Kontrol* (bagaimana mengukur efektivitas komunikasi publik).

A) Situation Analysis/Analisis Situasi

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), analisis situasi untuk mengetahui, memahami dan merinci kondisi internal dan eksternal lembaga berkaitan dengan komunikasi yang akan dilakukan. Tiga langkah dalam analisis situasi meliputi: pertama, identifikasi isu-isu apa yang muncul atau bahkan dapat dikategorikan cukup menonjol dalam kurun waktu tertentu. Kedua, rumuskan permasalahan komunikasi berdasarkan identifikasi. Ketiga, pendekatan solusi komunikasi yang dapat digunakan untuk merespons situasi yang ada.

Diskominfo Kudus dalam melakukan identifikasi, merumuskan, dan analisis isu-isu yang beredar di masyarakat selama Covid-19 berperan dalam mengumpulkan informasi dan menangani isu-isu terkait hoaks dan disinformasi yang berkembang di masyarakat. Diskominfo melakukan patroli media sosial guna merangkum isu-isu yang beredar di masyarakat dengan memantau isu-isu di media sosial terkait Covid-19 di Kudus. Isu-isu yang ada yakni banyak beredar berita hoax menyangkut ada tidaknya Covid-19, hoax terkait lonjakan kasus Covid-19, hingga hoax seputar vaksin. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Dalam mengidentifikasi atau merumuskan isu-isu di masyarakat, Diskominfo Kudus mengumpulkan informasi dan menangani isu (hoaks & disinformasi) yang berkembang di masyarakat. Diskominfo Kudus melakukan patroli media sosial guna merangkum isu-isu yang beredar di masyarakat dengan memantau isu-isu di media sosial terkait Covid-19 di Kudus. Isu-isu yang ada yakni banyak beredar berita hoax menyangkut ada tidaknya Covid-19, hoax terkait lonjakan kasus Covid-19, hingga hoax seputar vaksin”

(Wawancara Ery, 6 Juni 2022)

**JATENG MELEDAK
UPDATE DATA MINGGU INI, Kab Kudus
peringkat pertama**

Ngenes lihatnya
Kapan keluar

1. BOYOLALI positif 210 orang
2. SOLO positif 195 orang
3. SALATIGA positif 205 orang
4. PEMALANG positif 225 orang
5. GROBOGAN positif 188 orang
6. KENDAL positif 175 orang
7. JEPARA positif 210 orang
8. TEGAL positif 165 orang
9. SEMARANG positif 215 orang
10. BLORA positif 125 orang
11. REMBANG positif 250 orang
12. KUDUS positif **2.210 orang**
13. DEMAK positif 125 orang

Kementerian Kesehatan memperkirakan

Gambar 3. 4 Informasi hoaks yang menyebutkan jumlah kasus di Kudus mencapai 2.210 sempat mengemparkan warga Kudus

**Untuk temen2 di Kudus
lebih berhati hati
nggih, 28 dari 34
sampel yang diperiksa
di FK UGM terbukti
varian dari India**

Gambar 3. 5 informasi hoaks terkait varian India di Kudus

Diskominfo Kudus melakukan pendekatan dalam memberikan solusi komunikasi terhadap problem isu yang beredar dengan memperhatikan arahan dari pusat dan juga melibatkan tokoh yang berkompeten dalam masalah tersebut. Contoh kasusnya adalah saat isu kehalalan vaksin muncul, maka Pemkab Kudus menggandeng sejumlah tokoh agama sebagai pihak yang berkompeten untuk turut meluruskan berita

hoaks seputar kehalalan vaksin. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Dalam melakukan pendekatan dari isu yang beredar, Diskominfo Kudus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta menggandeng pihak yang berkompeten dalam memahami isu yang beredar tersebut. Sebagai contoh saat isu kehalalan vaksin merebak, Diskominfo Kudus menggandeng sejumlah tokoh agama sebagai pihak yang berkompeten untuk memberikan statement terkait kehalalan vaksin sebagai solusi serta mengikutsertakan tokoh tersebut dalam kegiatan vaksin”
(Wawancara Rifqi, 6 Juni 2022)

Selama wabah covid 19 berlangsung, Diskominfo Kudus selaku lembaga resmi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kudus bertugas menyampaikan isi pesan yang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang meliputi protokol kesehatan, pelaksanaan PPKM, serta pelaksanaan kegiatan Vaksinasi di wilayah Kabupaten Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Isi pesan yang kami sampaikan tentunya sejalan dengan instruksi dari pemerintah pusat, yakni terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan PPKM, dan menggalakkan pelaksanaan vaksin di Kabupaten Kudus”
(Wawancara Rifqi, 6 Juni 2022)

Berdasarkan temuan wawancara penulis, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung Diskominfo menggunakan isi pesan utama yang telah dirancang oleh pemerintah pusat, hal tersebut dikarenakan virus Covid-19 menjadi masalah nasional hingga dunia. Adapun pesan utama yang diangkat yakni mengenai protokol kesehatan, pelaksanaan PPKM, serta program vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Kita paham bahwa COVID 19 adalah wabah dunia, sehingga pesan utama dalam penanganan COVID-19 tentunya dirancang oleh pemerintah pusat yang. Adapun pesan utamanya tetap sama, yakni terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan PPKM, dan menggalakkan pelaksanaan vaksin”
(Wawancara Rifqi, 6 Juni 2022)

Sebelum melaksanakan komunikasi publik, Diskominfo Kudus telah memprediksi problem apa yang dapat muncul dalam proses penyampaian pesan. problem yang diprediksi antara lain jangkauan pesan, penerimaan dari masyarakat atas pesan tersebut, dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di saat pandemi berlangsung. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Prediksi atas masalah yang timbul dalam penyampaian pesan adalah

jangkauan pesan, penerimaan dari masyarakat atas pesan tersebut, dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di saat pandemi berlangsung” (Wawancara Ery, 6 Juni 2022)

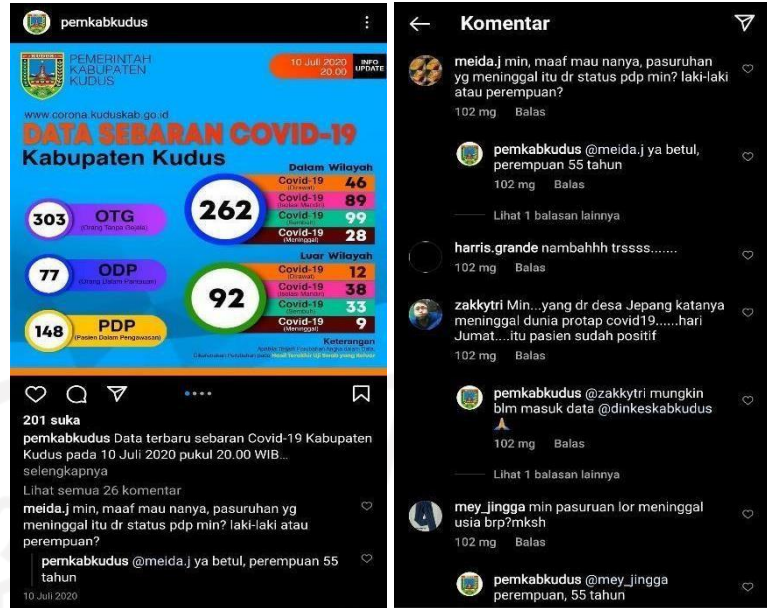
Dibawah ini merupakan profil akun Instagram resmi Pemkab Kudus @pemkabkudus yang memiliki 26,6 ribu pengikut.



Gambar 3. 6 profil media sosial pemerintah kabupaten Kudus
<https://www.instagram.com/pemkabkudus/>

Dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik, Diskominfo menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan website yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang melek teknologi seperti generasi milenial. Media sosial merupakan alat komunikasi yang efektif, sebagai contoh Instagram yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki followers sebanyak dua puluh enam ribu orang digunakan sebagai media interaksi terkait covid-19 oleh Diskominfo Kabupaten Kudus.

Berikut merupakan contoh interaksi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus dalam informasi data sebaran Covid-19 Kabupaten Kudus melalui Instagram. Informasi tersebut mendapat 200 *like*/suka dan 13 komentar dari masyarakat. Sebagian besar komentar yang masuk berisi pertanyaan seputar Covid-19 dan Diskominfo menjawab seluruh pertanyaan tersebut.



Gambar 3. 7 Data sebaran Covid-19 di Instagram Pemkab Kudus Gambar <https://www.instagram.com/p/CCdwP7BDtjO/>

Gambar 3. 8 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus



Gambar 3. 9 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus

Gambar 3. 10 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus



Gambar 3. 11 tanggapan masyarakat terhadap postingan di Instagram PemkabKudus

Pada gambar diatas, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Diskominfo selaku pengelola media sosial melakukan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kudus terkait data sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus melalui kanal instagram dan mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat.

Selain menggunakan media online, Diskominfo Kudus juga melakukan aktivitas komunikasi publik melalui patroli lingkungan ke desa-desa yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses media online seperti lansia ataupun kelompok masyarakat ekonomi rendah. Pertimbangan dalam menggunakan kedua metode tersebut disesuaikan dengan target yang ingin dituju. Media online lebih familiar bagi kaum milenial, sedangkan penyampaian informasi secara langsung dengan berkeliling ke desa-desa dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Penggunaan media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, website) ditujukan kepada kelompok masyarakat yang melek teknologi seperti halnya generasi milenial. Adapun penyampaian pesan melalui patroli lingkungan ke desa-desa ditujukan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atas media online seperti lansia ataupun kelompok masyarakat ekonomi rendah. Pertimbangan dalam menggunakan kedua metode tersebut disesuaikan dengan target yang ingin dituju. Media online lebih familiar bagi kaum milenial, sedangkan penyampaian informasi secara langsung dengan berkeliling ke desa-desa dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi”
 (Hasil Wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Sasaran publik media sosial dijangkau oleh Diskominfo Kabupaten Kudus melalui penampilan pesan dalam bentuk visual (gambar) yang mudah diterima dan dipahami oleh publik sasaran. Unggahan dengan tampilan yang menarik akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh publik sasaran khususnya di media sosial. Selain itu, Diskominfo juga menampilkan pesan yang mudah dicerna oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami pesan dan diharapkan dapat merubah perilaku sesuai dengan yang dianjurkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Diskominfo Kudus menampilkan pesan dalam bentuk visual (gambar) yang mudah diterima dan dipahami oleh publik sasaran. Unggahan dengan tampilan yang menarik akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh publik sasaran khususnya di media sosial. Selain itu, Diskominfo juga menampilkan pesan yang mudah dicerna oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami pesan dan diharapkan dapat merubah perilaku sesuai dengan yang dianjurkan”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

B) Objectives/Tujuan

Setiap strategi komunikasi memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), secara umum strategi komunikasi diarahkan untuk menyebarluaskan informasi agar meningkatkan pemahaman dan pada gilirannya diharapkan terjadi perubahan perilaku. Tujuan komunikasi dikaitkan dengan pendekatan solusi komunikasi. Tujuan komunikasi publik harus disusun dan ditetapkan secara jelas dan terstruktur.

Dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik, pemerintah kabupaten Kudus memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat sehingga masyarakat secara sadar mau mendukung program-program dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Tujuan dari aktivitas komunikasi tentu saja menyediakan informasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid sehingga pada akhirnya masyarakat mau mendukung program-program dari Pemerintah tidak berdasarkan paksaan tetapi kesadaran”
(Hasil Wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

A) Strategy/Strategi & Tactics/Taktik

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), strategi adalah uraian yang

menjelaskan strategi konten dan media komunikasi publik serta gambaran umum khalayak sasaran yang dituju untuk periode tertentu. Strategi meliputi materi konten yang akan disampaikan kepada publik terkait kebijakan (strategi konten), media apa yang akan digunakan (strategi media), target khalayak secara spesifik dan durasi waktu pelaksanaan aktivitas komunikasi publik. Sementara taktik ialah uraian yang menjelaskan turunan atau rincian dari strategi berupa jenis materi konten dan media komunikasi publik serta khalayak sasaran secara spesifik sesuai dengan materi konten dan media komunikasi publik yang digunakan.

Terdapat strategi (cara mengelola) untuk setiap komunikasi publik yang dijalankan oleh Diskominfo. Untuk sosial media terdapat informasi rutin dan situasional yang diberikan. Informasi rutin meliputi kasus aktif Covid-19. Adapun informasi spontan yang diberikan karena peristiwa tidak terduga seperti saat terjadi kerumunan atau sidak. Untuk akun sosial media dipegang oleh bagian komunikasi, admin tiap sosial media berbeda-beda namun cara mengelolanya sama. Segala isu terkait Covid-19 selalu di *update* di semua sosial media. Untuk Facebook dan Instagram yang relatif leluasa dalam ketentuan postingannya, suatu informasi dapat kami sampaikan dalam satu post saja. Berbeda dengan Twitter yang dibatasi jumlah karakternya, maka informasi akan dibagi ke beberapa post (thread). Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Sosial media terdapat informasi rutin (kasus aktif) dan situasional, ada juga komunikasi yang spontan karena kejadian tidak terduga, misal terjadi kerumunan atau sidak. Yang pegang sosmed bagian komunikasi, admin tiap sosmed berbeda-beda. Satu platform satu orang, tapi juga bisa diakses oleh pimpinan seluruh pejabat struktural (kadinis, kabidang). Semua sosmed cara pengelolaannya sama. Isu terkait Covid dan aktivitas bupati selalu di update di semua sosmed. Untuk Facebook dan Instagram yang relatif leluasa dalam ketentuan postingannya, suatu informasi dapat kami sampaikan dalam satu post saja. Berbeda dengan Twitter yang dibatasi jumlah karakternya, maka informasi akan dibagi ke beberapa post (thread)”
(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Dalam melancarkan komunikasi publik, Diskominfo Kudus mengoptimalkan penyampaian informasi melalui sosial media Diskominfo Kudus maupun Pemerintah Kudus. Selain itu, akun sosial media pribadi Bupati Kudus selaku komunikator utama juga dijadikan platform untuk melancarkan komunikasi publik terkait Covid-19. Namun, narasumber tidak menjelaskan bagaimana pengelolaan media sosial pribadi Bupati Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Komunikator utama adalah Bupati Kudus yang menyampaikan informasi penanganan COVID-19 melalui media sosial milik pemerintah kabupaten maupun melalui akun media sosial pribadinya”

(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Pihak Diskominfo selalu melakukan monitoring, analisis sosial media seperti seberapa banyak jangkauan, *like*, dan isi komentar di data. Analisis data dilakukan setiap hari Sabtu hingga Kamis, kemudian data direkap apa saja kritik atau pertanyaan yang disampaikan masyarakat, setelah itu Kamis sore atau Jum'at pagi data diserahkan kepada bupati data mana saja yang bisa ditindaklanjuti secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Dari sisi monitoring, kami menyadari bahwa proses interaksi sosmed tidak berhenti saat memposting sesuatu. Kami selalu melakukan monitoring, analisis sosial media: seberapa banyak jangkauan, like, dan isi komentar di data. Analisis data dilakukan rutin setiap hari Sabtu-Kamis, Kamis direkap keluhan, kritik, pertanyaan masy yang tidak bias secara langsung ditangani. Kamis sore atau Jumat pagi diserahkan kepada Bupati mana yang bisa ditindaklanjuti secara langsung”
(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Sementara untuk kampanye keliling, Satgas Covid-19 pusat (nasional) terjun ke Kudus beserta panglima TNI, Adi Cahyanto dan Kapolri guna melihat kondisi Kudus serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam rapat tersebut, sepakat bahwa dibutuhkan sosialisasi secara langsung dan berjalan selama kurang lebih sebulan saat Kudus memasuki zona hitam (Juni-Juli). Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Satgas Covid pusat (nasional) turun ke Kudus, ada juga panglima TNI, Adi Cahyanto dan Kapolri melihat kondisi Kudus, melakukan rapat bersama pihak terkait seperti pemprov, pemkab, merumuskan kegiatan upaya penanganan penyebaran Covid. Kami sepakat bahwa butuh sosialisasi secara langsung. Koordinasi antar lembaga, menyusun jadwal desa mana yang akan dilakukan sosialisasi (seluruh desa), menampilkan personel, menyiapkan keperluan teknis. Satu hari cover satu kecamatan. Program tersebut berjalan kurang lebih sebulan, saat kasus meledak dari Juni-Juli”
(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

B) Actions/Aksi

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), aksi adalah uraian yang menjelaskan aktivitas komunikasi publik yang akan dilakukan dari waktu ke waktu dalam satu periode tertentu (dilengkapi waktu pelaksanaan). Aksi meliputi: dalam satu periode tergambar penggunaan media komunikasi publik secara spesifik; prioritas program dan ketersediaan anggaran; adanya kejelasan kapan waktu tayang atau waktu

pemuatan konten.

Diskominfo Kudus selaku penyalur informasi yang resmi dari pemerintah juga bekerja sama dengan media lokal dan nasional untuk pemberitaan Covid-19, kerjasama tersebut dalam bentuk publikasi informasi terkait Covid-19 dari pemerintah kabupaten Kudus. Diskominfo Kabupaten Kudus juga utin berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Pemkab Kudus beserta dinas terkait untuk menghimpun informasi mengenai kebijakan penanganan Covid-19, hal tersebut dilakukan guna menjaga citra dan reputasi Diskominfo Kudus sebagai lembaga terdepan dan terpercaya dari pemerintahan kabupaten kudus dalam menyebarkan informasi terkait Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Semuanya dalam bentuk informasi yang kita berikan. Khusus untuk yang radio karena pengelolaan masih di Dinas kominfo, konten iklan kita produksi sendiri, dialog interaktif dengan mengundang narasumber terkait penanganan Covid-19. Media yang diajak bekerjasama antara lain media cetak: Radar Kudus, Suara Merdeka, Lingkar Jateng, Joglo Jateng, Tribun Jateng; media online: suarabaru.com, suaramuria.com, murianews.com, cakrajateng.com, bratanews.com, lingkarjateng.com, tribunjateng.com; radionya adalah Radio Suara Kudus; TV nasional: Metro TV; TV regional : INews”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Pada fase tiga bulan pertama pandemi, Diskominfo sebagai lembaga komunikasi resmi pemerintah Kudus gencar menginformasikan kepada masyarakat terkait tindakan Pemkab Kudus dalam menangani Covid-19. Diskominfo Kudus berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemkab Kudus serius dalam menangani Covid-19. Seperti yang tercantum dalam beberapa unggahan website Diskominfo Kudus sebagai berikut :



Gambar 3. 12 Artikel website Diskominfo Kudus terkait tindakan Pemkab Kudus saat strelisisasi jalan untuk cegah Covid-19 <https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/pemkab-kudus-lakukan->

sterilisasi-jalan-cegah-covid19



Gambar 3. 13 Artikel website Diskominfo Kudus terkait tindakan Pemkab Kudus saat berkoordinasi dengan RT/RW
<https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/serius-tangani-covid19-pemkab-minta-keterlibatan-aktif-rtrw>

Pada fase PPKM, Diskominfo kudus aktif menginformasikan kebijakan PPKM dari pusat kepada masyarakat. Kesadaran prokes yang naik di kalangan masyarakat dibarengi dengan tingginya mobilitas menjadikan komunikasi terkait kebijakan PPKM menjadi informasi yang gencar disiarkan oleh Diskominfo kabupaten Kudus melalui kanal website dan media massa. Seperti dalam poster dibawah ini yang mendapat 23 like/suka



Gambar 3. 14 Poster Instagram Diskominfo Kudus terkait PPKM
<https://www.instagram.com/p/CRA6-xGJ3Ko/>

Pada fase kebijakan mudik lebaran, Diskominfo menyampaikan anjuran larangan mudik dari pemerintah kepada masyarakat dengan membuat konten video menggunakan bahasa sehari-hari warga Kudus yakni bahasa Jawa. Dalam video tersebut juga memparodikan masyarakat yang kerap menempuh jalan tikus untuk menghindari penyekatan. Video tersebut dibagikan ke dalam Instagram Diskominfo Kudus yang

mendapat 34 *like*/suka dan 525 tayangan.



Gambar 3. 15 Video informasi larangan mudik yang dibagikan di akun Instagram Diskominfo Kudus

<https://www.instagram.com/p/COsQ5BJDvwW/>

Pada fase vaksinasi, Diskominfo gencar mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi dalam pencegahan virus Covid-19. Seperti dalam salah satu postingan di Instagram, Diskominfo membagikan testimoni dari masyarakat Kudus di berbagai bidang pekerjaan yang telah di vaksin. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan dan halal. Video tersebut mendapat 18 *like*/suka, 362 tayangan dan dua komentar masyarakat. Diskominfo Kudus juga merespon pertanyaan yang masuk di kolom komentar.



Gambar 3. 16 Video masyarakat Kudus yang telah divaksin dibagikan di Instagram Diskominfo Kudus beserta tanggapan Diskominfo terkait komentar yang masuk <https://www.instagram.com/p/CRA0brmJB76/>

Pada postingan lainnya, Diskominfo Kudus juga membuat video berisi informasi vaksin bertepatan dengan bulan Ramadhan. Memanfaatkan momen itu, Diskominfo menampilkan tradisi masyarakat Kudus saat Ramadhan ‘tongtekan’ yakni membangunkan tetangga untuk bangun sahur. Dalam video tersebut, Diskominfo memberikan informasi terkait pentingnya vaksin, informasi tempat pelaksanaan vaksin hingga persyaratan vaksin. Video tersebut mendapat 88 like/suka dan 32 komentar. Komentar yang masuk dalam video tersebut berisi pendapat masyarakat bahwa video yang disajikan Diskominfo Kudus sangat menghibur dan informatif.



Gambar 3. 17 Video informasi vaksin di Instagram Diskominfo
<https://www.instagram.com/p/CcaL8X3A8Yj/>



Gambar 3. 18 tanggapan Diskominfo terhadap komentar yang masuk pada , postingan video vaksinasi

Dalam memonitoring kondisi masyarakat Kabupaten Kudus dalam fase- fase yang penulis sebutkan di paragraf sebelumnya, Diskominfo Kabupaten Kudus rutin berkoordinasi dengan setiap lembaga yang ada di pemerintahan kabupaten Kudus sebagai sumber informasi yang kompeten sehingga informasi- informasi yang

didapatkan dapat disebarkan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Diskominfo tidak bekerja sendiri, fungsi Diskominfo dalam membantu Bupati Kudus melaksanakan tugas komunikasi dan informasi membuat Diskominfo memiliki akses terhadap informasi-informasi tersebut yang datang dari berbagai sumber (OPD terkait, lembaga negara yang lain, ormas, dll” (Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Dalam komunikasi publik, Diskominfo Kudus merancang narasi sesuai arahan dari pemerintah pusat dengan sedikit modifikasi sesuai daerah di kabupaten Kudus. Bidang yang memiliki tupoksi dalam merancang narasi adalah bidang komunikasi dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis maupun persetujuan pimpinan daerah. Namun, kepala bidang komunikasi Diskominfo Kudus selaku narasumber tidak menyebutkan secara rinci modifikasi apa saja yang dirancang dalam komunikasi publik terkait Covid-19 di Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena masalah yang dihadapi sama, maka narasinya pun sama, dengan sedikit modifikasi sesuai dengan nilai yang ada di daerah tersebut. Di Dinas Kominfo yang memiliki tupoksi dalam merancang pesan-pesan adalah bidang komunikasi dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis maupun persetujuan oleh Pimpinan Daerah” (Wawancara Ery, 6 Juni 2022)

Dalam proses menyusun narasi pesan, Diskominfo Kudus mengadopsi dari narasi pemerintah pusat. Modifikasi yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan desain atau template dari sosial media Pemkab Kudus. Sebagai contoh, dalam himbuan penggunaan masker yang dilakukan oleh Pemkab Kudus merupakan narasi dari pemerintah pusat kemudian mengganti tokoh presiden dengan Bupati Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus.

Dibawah ini merupakan dua poster terkait wajib menggunakan masker disaat pandemi Covid-19. Poster sebelah kiri dari pemerintah pusat sedangkan sebelah kanan dari Pemkab Kudus. Kedua poster tersebut memiliki desain dan narasi yang mirip. Yang membedakan hanyalah tokoh presiden dan tokoh Bupati Kudus.



Gambar 3. 19 poster himbuan pemerintah pusat

Gambar 3. 20 poster himbuan pemerintah kabupaten Kudus
<https://www.instagram.com/p/CRgTWfNjvIT/>

“untuk menyusun narasi, Diskominfo Kudus mengadopsi narasi dari pemerintah pusat. Hanya saja di modifikasi menyesuaikan dengan desain atau template dari sosial media pemerintah Kudus”
 (Wawancara Ery, 6 Juni 2022)

Berdasarkan pemaparan penulis serta keterangan wawancara di paragraf sebelumnya, diketahui bahwa narasi pemerintah pusat dalam komunikasi publik dimasa Covid-19 adalah melingkupi penegakan protokol kesehatan, sosialisasi penerapan PPKM, serta vaksinasi yang mana narasi tersebut akan dikomunikasikan oleh setiap kepala daerah melalui diskominfo dengan memanfaatkan media yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Narasi dari pemerintah pusat adalah penegakan protokol kesehatan (3M atau 5M, dan 3T), penerapan PPKM sebagai upaya menghambat laju penyebaran COVID-19, dan vaksinasi”
 (Wawancara Rifqi, 6 Juni 2022)

Dalam melakukan komunikasi melalui media online, bentuk penyajian konten di setiap sosial media Diskominfo Kudus sama dengan satu informasi yang di posting ke semua sosial media. Hanya saja khusus untuk Twitter karena terbatas oleh beberapa jumlah karakter saja, maka dalam satu informasi dipisah menjadi sebuah thread atau menggunakan caption yang lebih singkat dibanding platform lain. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo

Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :



Gambar 3. 21 postingan Twitter Diskominfo Kudus yang terpisah dalam thread

“Tidak ada perbedaan dalam informasi yang disampaikan baik di website maupun di berbagai media sosial. Yang berbeda hanyalah penyajian konten di Twitter karena jumlah karakternya terbatas maka biasanya kami pisah dalam thread atau dengan caption yang singkat”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi yang interaktif oleh diskominfo kabupaten Kudus selama masa pandemi covid-19 menjadi wadah baru bagi diskursus masyarakat. Media sosial bukan hanya media publikasi namun juga berisi saran, kritik, serta komentar lainnya dari warganet kabupaten Kudus yang sebagian besar berisi pertanyaan seputar kebijakan PPKM, ketersediaan kamar di rumah sakit, ketersediaan tabung oksigen, jadwal dan lokasi vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Komentar, kritik, saran dan pertanyaan banyak masuk ke akun media sosial kami yang merupakan suatu kewajaran mengingat media sosial telah menjadi wadah baru bagi diskursus masyarakat. Sebagian besar komentar yang masuk meliputi pertanyaan tentang kebijakan PPKM, ketersediaan kamar di RS, ketersediaan tabung oksigen, jadwal dan lokasi vaksinasi”
(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Setiap saran, masukan, serta pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar diskominfo kabupaten Kudus akan dikoordinasikan dengan instansi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, pertanyaan seputar ketersediaan tabung oksigen akan dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit atau dinas kesehatan hingga mendapatkan keterangan lalu jawaban tersebut akan disampaikan oleh Diskominfo kabupaten Kudus di media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

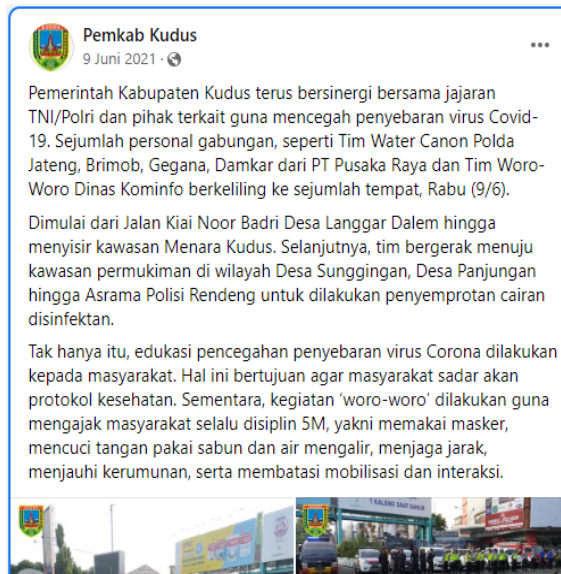
“Komentar yang masuk ke akun media sosial kami akan kami segera teruskan kepada pihak-pihak (OPD) yang mengurus urusan yang disampaikan dalam komentar tersebut. Seperti mengenai ketersediaan kamar rumah sakit atau tabung oksigen akan dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit atau dinas kesehatan”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Dibawah ini merupakan materi publik Diskominfo Kudus melalui akun Facebook berisi informasi PPKM Mikro. Postingan tersebut mendapatkan 28 like/suka, 5 komentar dan satu kali dibagikan.



Gambar 3. 22 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait PPKM Mikro <https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2639618579664746>

Dibawah ini merupakan materi komunikasi publik Diskominfo Kudus melalui akun Facebook berisi informasi aktivitas Pemkab Kudus bersama beberapa lembaga bersinergi dalam menangani Covid-19. Postingan tersebut mendapat 78 like/suka, 6 komentar dan satu kali dibagikan.



Gambar 3. 23 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait kerjasama dengan TNI dan Polri melakukan kampanye keliling pencegahan virus Covid-19 dan penyemprotan disinfektan



<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2627218050904799>

Gambar 3. 24 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait kerjasama dengan TNI dan Polri melakukan kampanye keliling pencegahan virus Covid-19 dan penyemprotan disinfektan

<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2627218050904799>

Dibawah ini merupakan materi komunikasi publik Diskominfo Kudus melalui akun Facebook terkait kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali. Postingan tersebut mendapat 39 like/suka, tiga komentar dan empat kali dibagikan.



Gambar 3. 25 materi komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali
<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2643317862628151>

Selain melakukan komunikasi publik menggunakan media online, Diskominfo Kudus bersama jajaran terkait juga melakukan komunikasi publik secara offline yakni program patroli lingkungan yang bekerjasama dengan pihak TNI-Polri berkeliling desa untuk mengkampanyekan penegakan protokol kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua minggu. Selain berkeliling, Diskominfo juga melakukan pemasangan baliho dengan pesan yang sama terkait kampanye protokol kesehatan di beberapa titik strategis yakni di alun-alun serta kantor pemerintah di berbagai level. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Komunikasi secara luring dilakukan melalui program patroli lingkungan yang bekerjasama dengan pihak TNI-Polri dengan berkeliling ke desa-desa untuk menyampaikan pesan terkait penegakan protokol kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu. Pemasangan baliho di berbagai titik strategis (alun-alun, kantor pemerintah di berbagai level) dengan pesan yang sama juga dilakukan selama masa pandemi”
(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Kegiatan komunikasi publik Diskominfo Kudus dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat, terlebih mengenai himbauan protokol kesehatan dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat Kudus dan terlihat dari perubahan perilaku masyarakat Kudus telah sesuai himbauan kesehatan. Agar indikator tersebut tercapai, dalam komunikasi publik Diskominfo Kudus fokus terhadap penyampaian pesan terkait protokol kesehatan dan terus memantau jumlah kasus serta

tingkat vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Komunikasi publik Diskominfo Kudus terkait Covid-19 dapat dianggap berhasil ketika pesan yang disampaikan dapat sampai ke masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku di masyarakat sesuai protokol kesehatan. Diskominfo fokus terhadap sosialisasi pesan terkait protokol kesehatan dan terus memantau jumlah kasus serta tingkat vaksinasi”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Penulis turut menghimpun data dari masyarakat dengan latar belakang berbeda, diantaranya adalah mahasiswa, freelance fotografer, wiraswasta, petani dan guru. Data yang dihimpun oleh penulis digunakan sebagai pembandingan dengan hasil wawancara penulis bersama Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Komunikasi Publik dalam penanganan Covid-19.

Berikut adalah daftar narasumber penulis dari kalangan masyarakat :

No	Nama	Profesi
1	Sonia	Mahasiswa
2	Samudera Pangestu	Freelance Fotografer
3	Endah	Wiraswasta
4	Nulipah	Petani
5	Riski	Guru

Tabel 3. 2 Narasumber masyarakat Kudus

Narasumber pertama yang penulis wawancarai adalah Sonia, seorang mahasiswa asal Kabupaten Kudus. Hasil wawancara penulis menemukan bahwa ia mengetahui informasi seputar Covid-19 di Kabupaten Kudus melalui akses media sosial serta informasi yang persuasif dari individu ke individu lainnya.

Informasi seputar Covid-19 yang diperoleh narasumber meliputi regulasi terbaru pemerintah Kabupaten Kudus di tengah merebaknya Covid-19, program vaksin, serta perkembangan kasus pasien Covid-19 di Kabupaten Kudus. Menurutnya, komunikasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kudus dengan menggunakan media digital berguna bagi masyarakat serta mampu mengubah dan mengontrol perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Berikut daftar pertanyaan wawancara beserta jawaban yang penulis bersama Sonia selaku narasumber dari kalangan mahasiswa :

Tabel 3. 3 Hasil Wawancara dengan Sonia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui informasi seputar covid-19 dari pemkab Kudus?	Ya, saya mengetahui infonya
2	Dari mana anda memperoleh informasi terkait kebijakan Pemkab Kudus selama Covid-19 ?	Dari media online, informasi spanduk dan orang ke orang ya
3	Informasi seputar Covid-19 tentang apa saja yang anda dapatkan dari Pemkab Kudus?	Informasi seputar kebijakan selama Covid 19 di Kudus mulai dari larangan, peraturan, pelaksanaan vaksin, info jumlah pasien covid dan lainnya
4	Bagaimana tanggapan anda terkait kampanye Covid-19 yang dijalankan Pemkab Kudus??	Menurut saya cukup bagus ya, dengan adanya kampanye yang dilakukan berguna bagi masyarakat untuk lebih mudah mendapat informasi terkait covid 19 jadi kampanye seperti ini berguna ya bisa mengetahui perkembangan covid 19 di Kudus sendiri. Terlebih lagi kita bisa memantau kerja dari Bupati Kudus melalui sosial media karena nampak dari foto-foto dokumentasi kegiatannya
5	5. Apakah anda mengikuti anjuran pencegahan Covid-19 Pemkab Kudus?? (Dalam arti kata lain anda merubah perilaku anda sesuai prokes setelah mendapatkan informasi dari Pemkab Kudus dalam penanganan Covid-19)	Tentu iya, saya selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga kebersihan, menjaga jarak dan mendapatkan vaksin ya

Selanjutnya, penulis melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang bernama Samudera Pangestu dengan profesi fotografer. Hasil wawancara penulis menemukan bahwa Ia mengetahui informasi seputar Covid-19 di Kabupaten Kudus melalui sosial media Pemerintah Kabupaten Kudus.

Informasi yang didapatkannya seputar Covid-19 meliputi regulasi terbaru pemerintah Kabupaten Kudus mengenai Covid-19, vaksin, serta perkembangan varian Covid-19 di Kabupaten Kudus. Menurutnya, komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Diskominfo sudah cukup baik dan merata dan dapat melihat keaktifan Bupati Kudus dalam menangani Covid-19. Ia menjelaskan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus membuatnya lebih taat terhadap protokol kesehatan dengan mengikuti anjuran terkait protokol kesehatan serta berupaya untuk mencegah dengan mengikuti aturan pemerintah.

Tabel 3. 4 Hasil Wawancara dengan Samudera

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui informasi seputar covid-19 dari pemkab Kudus?	Ya, saya mengetahui infonya
2	Dari mana anda memperoleh informasi terkait kebijakan Pemkab Kudus selama Covid-19 ?	Dari sosial media Instagram
3	Informasi seputar Covid-19 tentang apa saja yang anda dapatkan dari Pemkab Kudus?	Ppkm, 3m, update virus, kebijakan baru, vaksin.
4	Bagaimana tanggapan anda terkait kampanye Covid-19 yang dijalankan Pemkab Kudus??	Kampanye yang dilakukan cukup bagus, cukup merata. Bupati Kudus juga saya lihat aktif dalam menangani Covid-19 ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi Corona
5	5. Apakah anda mengikuti anjuran pencegahan Covid-19 Pemkab Kudus?? (Dalam arti kata lain anda merubah perilaku anda sesuai prokes setelah mendapatkan informasi dari Pemkab Kudus dalam penanganan Covid-19)	Tentu saya mengikutinya. Solusi adalah solusi, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Narasumber ketiga yang penulis wawancarai adalah seorang wiraswasta di Kabupaten Kudus yang bernama Endah. Ia mengatakan bahwa informasi seputar Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Kudus didapatkan melalui media online.

Informasi yang ia dapatkan seputar Covid-19 di Kabupaten Kudus meliputi bahaya Covid-19, anjuran memakai masker, perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, serta larangan untuk berkerumun. Endah mengatakan, komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Diskominfo terkait Covid-19 sudah cukup baik dan mudah diakses. Endah menambahkan, peraturan dari pemerintah Kabupaten Kudus seputar Covid-19 yang terbit selalu ia ikuti guna melawan penyebaran virus.

Tabel 3. 5 Hasil Wawancara dengan Endah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui informasi seputar covid-19 dari pemkab Kudus?	Ya, saya mengetahui infonya
2	Dari mana anda memperoleh informasi terkait kebijakan Pemkab Kudus selama Covid-19 ?	Dari media online
3	Informasi seputar Covid-19 tentang apa saja yang anda dapatkan dari Pemkab Kudus?	Informasi tentang bahaya virus corona, anjuran untuk memakai masker, physical distancing, menghindari kerumunan, informasi tentang banyaknya pasien dan korban jiwa, informasi tentang larangan aktivitas yang menyebabkan kerumunan
4	Bagaimana tanggapan anda terkait kampanye Covid-19 yang dijalankan Pemkab Kudus??	Menurut saya sudah baik, karena saya mudah memperoleh informasi tentang penularan virus corona di Kudus dan tentang himbauan apa yang sebaiknya saya lakukan di masa pandemi, Pemkab juga sudah memudahkan saya dan keluarga untuk mendapatkan vaksinasi

5	5. Apakah anda mengikuti anjuran pencegahan Covid-19 Pemkab Kudus?? (Dalam arti kata lain anda merubah perilaku anda sesuai prokes setelah mendapatkan informasi dari Pemkab Kudus dalam penanganan Covid-19)	Iya, saya mengikuti anjuran dari Pemkab Kudus, karena saya tahu bahayanya virus tersebut setelah saya dan keluarga pernah merasakan sendiri masa-masa sulit melawan virus corona ini
---	---	--

Narasumber keempat yang penulis wawancarai adalah seorang petani di Kabupaten Kudus yang bernama Nulipah. Ia mengatakan bahwa informasi yang ia dapatkan seputar Covid-19 berasal dari Facebook Diskominfo Kudus beserta kepala desa.

Informasi yang ia dapatkan seputar Covid-19 di Kabupaten Kudus meliputi pelaksanaan vaksin, wajib memakai masker, larangan berkerumun serta menjaga kebersihan. Nulipah mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat ia terima dengan baik dan dapat mengikuti anjurannya.

Tabel 3. 6 Hasil Wawancara dengan Nulipah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui informasi seputar covid-19 dari pemkab Kudus?	Ya, saya tahu
2	Dari mana anda memperoleh informasi terkait kebijakan Pemkab Kudus selama Covid-19 ?	Saya dapat dari pak lurah dan juga di Facebook
3	Informasi seputar Covid-19 tentang apa saja yang anda dapatkan dari Pemkab Kudus?	Tentang pelaksanaan vaksin, wajib memakai masker, larangan berkerumun serta menjaga kebersihan diri dan rumah.
4	Bagaimana tanggapan anda terkait kampanye Covid-19 yang dijalankan Pemkab Kudus??	Sudah bagus karena informasinya sampai ke desa-desa

5	Apakah anda mengikuti anjuran pencegahan Covid-19 Pemkab Kudus?? (Dalam arti kata lain anda merubah perilaku anda sesuai prokes setelah mendapatkan informasi dari Pemkab Kudus dalam penanganan Covid-19)	Saya ikut anjuran pemerintah agar tidak tertular virus. Saya sudah di vaksin, memakai masker saat keluar rumah, dan rajin membersihkan diri dan rumah
---	--	---

Narasumber kelima yang penulis wawancarai adalah seorang guru honorer di Kabupaten Kudus yang bernama Riski. Ia mengatakan bahwa informasi yang ia dapatkan seputar Covid-19 berasal dari sosial media Diskominfo Kudus.

Informasi yang ia dapatkan seputar Covid-19 di Kabupaten Kudus meliputi perkembangan Covid-19 di Kudus beserta jumlah kasusnya, jadwal dan lokasi vaksinasi, wajib memakai masker dan PPKM. Riski mengatakan bahwa informasi yang didapat mampu merubah perilakunya untuk mentaati protokol kesehatan.

Tabel 3. 7 Hasil Wawancara dengan Riski

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui informasi seputar covid-19 dari Pemkab Kudus?	Saya mengetahui
2	Dari mana anda memperoleh informasi terkait kebijakan Pemkab Kudus selama Covid-19 ?	Saya melihat informasi-informasi itu dari sosial media resmi pemerintah
3	Informasi seputar Covid-19 tentang apa saja yang anda dapatkan dari Pemkab Kudus?	Informasi yang sering saya update adalah perkembangan Corona di Kudus beserta jumlah kasusnya, jadwal dan lokasi vaksin beserta syaratnya, wajib memakai masker dan PPKM seperti saat ada penyekatan jalan
4	Bagaimana tanggapan anda terkait kampanye Covid-19 yang dijalankan Pemkab Kudus??	Menurut saya sudah bagus karena saya lihat jumlah kasus Corona di Kudus juga sudah sangat membaik dibanding kemarin-kemarin saat Kudus banyak diberitakan di media nasional

5	Apakah anda mengikuti anjuran pencegahan Covid-19 Pemkab Kudus?? (Dalam arti kata lain anda merubah perilaku anda sesuai prokes setelah mendapatkan informasi dari Pemkab Kudus dalam penanganan Covid-19)	Tentu saya harus ikuti karena ini menyangkut keselamatan diri saya, keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Ya, kita sebagai masyarakat juga harus mengupayakan agar Corona bisa cepat hilang
---	--	--

D) Control/Kontrol

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP), kontrol adalah uraian yang menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi keseluruhan aktivitas komunikasi selama periode tertentu (menyertakan metode evaluasi yang digunakan). Dalam kontrol meliputi: memberikan penilaian kuantitatif terhadap aktivitas komunikasi publik serta menyajikan penilaian kualitatif terhadap aktivitas komunikasi publik.

Pada pelaksanaannya, komunikasi publik dalam penanganan Covid 19 oleh Diskominfo kabupaten Kudus mengevaluasi dampak komunikasi tersebut dengan melihat perubahan perilaku masyarakat terkait protokol kesehatan.

Indikator evaluasi dapat dilihat melalui data statistik dari departemen kesehatan terkait dengan lonjakan atau penurunan pasien positif Covid-19 serta jumlah pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan operasi masker. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis.

Dibawah ini merupakan artikel dari media online Antaranews Jateng yang memberitakan terkait penerapan protokol masyarakat Kudus yang terus meningkat.

Kepatuhan masyarakat Kudus terhadap protokol kesehatan meningkat

© Selasa, 23 Juni 2020 16:44 WIB



Gambar 3. 26 Artikel Antaranews Jateng menginformasikan kenaikan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan

<http://jateng.news/berita/detail/1592935204/1270597/kepatuhan-masyarakat-kudus-terhadap-protokol-kesehatan-meningkat/85359874457>

Dibawah ini merupakan artikel dari media online Harian Bhirawa News yang memberitakan terkait turunnya *Bed Occupancy Rate (BOR)* atau keterisian kamar rumah sakit Kabupaten Kudus dari 96% menjadi 15%. Hal tersebut menandakan kasus Covid-19 di Kudus turun dan angka kesembuhan pasien Covid-19 meningkat tajam.

Bed Occupancy Rate Kabupaten Kudus Turun dari 96 Persen Jadi 15 Persen
Author by Helmi Supriyatno Posted on 27/07/2021



Kudus, Bhirawa
Kabupaten Kudus sempat menjadi kota di Pulau Jawa dengan tingkat penularan Covid-19 yang cukup tinggi, namun kondisinya kini perlahan mulai membaik. Hal ini turut diakui oleh Menko Maritim & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Mikro Darurat Jawa - Bali.

Dalam rapat evaluasi kebijakan pada Senin (26/7), Luhut mengungkapkan Kudus dapat dijadikan contoh dalam menekan penyebaran virus corona, khususnya bagi sektor industri. Selaras dengan hal tersebut, Bupati Kudus, HM Hartopo menurkan membaiknya kondisi di Kudus tak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat serta pihak swasta dalam menanggulangi wabah berbahaya ini.

Sebelumnya, pada Juni 2021, Kudus ditetapkan sebagai wilayah zona merah merujuk total kasus aktif sebanyak 2.342 pasien dengan kasus harian tertinggi mencapai 479 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan positivity rate menembus angka 60 persen..

Related
DPR Partai Gerindra Jawa Timur Serahkan Saji Kurban ke PWNU
Iduladha 1.443 H. PT Luv Inti Sukses Abadi Bagikan Puluan Biot Hewan Kurban
PMK Tak Halangi KOMPAS Kora Surabaya Berbagi Hewan Kurban
Rabmas Karamil 0817/16 Dukun Cek Sumber Air Bersih Suplai Warga
Stabilisasi Harga Migor, Menjadikan Culus Ajaib Dianggap Hebat Sawit

Gambar 3. 27 Artikel Harian Bhirawa News menginformasikan turunnya BOR menandakan kasus Covid-19 di Kudus melandai drastis

<https://www.harianbhirawa.co.id/bed-occupancy-rate-kabupaten-kudus-turun-dari-96-persen-jadi-15-persen/>

Dibawah ini merupakan artikel dari media online Antaranews Jateng yang memberitakan terkait angka vaksinasi di Kudus yang terus meningkat meski telah mencapai 94,41%. Hal tersebut menandakan masyarakat Kudus memiliki kesadaran

yang besar akan pentingnya vaksinasi untuk menghilangkan Covid-19.

Kudus tingkatkan vaksinasi meski sudah capai 94,41 persen

© Rabu, 6 April 2022 11:03 WIB



Gambar 3. 28 Artikel Antaranews Jateng menginformasikan peningkatan vaksin di Kudus

<https://jateng.antaranews.com/berita/442393/kudus-tingkatkan-vaksinasi-meski-sudah-capai-9441-persen>

“Evaluasi komunikasi publik dalam penanganan COVID-19 dilakukan dengan melihat perubahan perilaku masyarakat terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan. Indikator dapat dilihat dari jumlah pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan operasi masker serta data perkembangan covid (pengurangan/penambahan terkonfirmasi covid-19) dari departemen kesehatan” (Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Faktor penghambat utama dari komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo Kudus adalah dari sisi jangkauan serta fasilitas teknologi yang belum digunakan oleh sebagian masyarakat kabupaten Kudus, mengingat informasi terkait penanganan Covid-19 harus dipastikan sampai ke semua masyarakat Kudus. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka Diskominfo Kudus bersinergi dengan setiap elemen yang ada di pemerintahan baik dari kabupaten hingga ke rt/rw dan juga elemen luar pemerintahan seperti TNI, Polri, serta ormas keagamaan (NU dan Muhammadiyah) dalam menyampaikan pesan. Sementara untuk faktor pendukungnya adalah sinergitas pemerintah kabupaten Kudus bersama Polri, TNI, Dinas Kesehatan, tokoh agama beserta elemen masyarakat di tingkat desa memudahkan Diskominfo untuk menyebarkan informasi terkait Covid-19 hingga sampai kepada masyarakat yang belum memiliki akses teknologi untuk mengetahui informasi seputar Covid-19 di Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Faktor penghambat utama adalah jangkauan/cakupan dari pesan dan informasi yang disampaikan mengingat informasi terkait penanganan COVID-19 ini harus dipastikan sampai ke setiap warga Kudus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka yang dilakukan adalah sinergi dengan setiap elemen yang ada di dalam pemerintahan (level pemerintah kabupaten hingga desa dan rt/rw), Dinas Kesehatan dan juga yang ada di luar pemerintahan seperti instansi lain (TNI- Polri) dan ormas keagamaan (NU-Muhammadiyah) dalam menyampaikan pesan tersebut. Sinergi yang dilakukan dengan jajaran terkait menjadi faktor pendukung Diskominfo dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Dalam program offline yang dilakukan terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari kegiatan offline adalah pesan atau informasi yang diberikan langsung tersampaikan ke masyarakat kabupaten Kudus, sedangkan kekurangannya adalah kegiatan tersebut kurang efisien karena faktor jarak dan waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Kelebihan dari kegiatan keliling desa adalah pesan atau informasi langsung tersampaikan ke masyarakat, sedangkan kekurangannya adalah kegiatan tersebut kurang efisien karena faktor jarak dan waktu” (Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Faktor pendukung komunikasi publik Diskominfo Kudus yang dilakukan secara offline adalah kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses ke media sosial akan informasi Covid-19, ketersediaan alat meliputi mobil yang digunakan untuk berkeliling, pengeras suara, serta baliho, kemudian personil yang terjun ke lapangan. Faktor penghambat dari kegiatan offline adalah mengenai jarak titik lokasi yang cukup jauh serta waktu yang kurang efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Faktor pendukungnya adalah kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses atas media sosial akan informasi COVID-19 dan ketersediaan alat (mobil, pengeras suara, baliho) dan personil. Faktor penghambatnya adalah masalah jarak lokasi yang cukup jauh dan waktu yang kurang efisien” (Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Tugas dan Fungsi Humas Pemerintah Kudus

Humas pemerintah adalah suatu kewajiban fungsional guna menyebarkan informasi mengenai program, kegiatan, dan kebijakan lembaga pemerintah kepada masyarakat (Rahmadi, 1999:77). Kemenkominfo membentuk program Tenaga Humas

Pemerintah (THP) berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. THP memiliki tugas untuk menyalurkan dan berkomunikasi dengan publik. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa THP juga memiliki tugas untuk menampung aspirasi publik berdasarkan program atau kebijakan pemerintah.

Tugas Diskominfo Kudus berkaitan dengan media adalah menjalankan jumpa pers dimana terdapat prosedur yang menjadi tanggungjawab Diskominfo Kudus. Teknis dalam menjalankan jumpa pers yakni menyiapkan narasumber (Bupati Kudus dan Jubir Satgas Covid-19) dan media, kebutuhan publikasi informasi, menentukan waktu pelaksanaan jumpa pers, mengkoordinir narasumber, mengundang media, menyiapkan lokasi pelaksanaan jumpa pers. Secara umum, jumpa pers dilaksanakan sebulan sekali secara offline selama masacovid-19 guna mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan covid-19 di Kabupaten Kudus. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan secara mendadak atau lebih dari sekali dalam sebulan jika ada hal urgen yang harus disampaikan terkait covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

‘Untuk mengumumkan perkembangan Covid-19 di Kudus biasanya dilakukan jumpa pers selama sebulan sekali secara offline. Namun, tidak menutup kemungkinan dilaksanakan jumpa pers mendadak atau lebih dari sekali dalam sebulan jika ada hal urgent yang harus disampaikan’
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Koordinasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kudus dengan media yang akan diundang ke dalam jumpa pers adalah dengan mengirimkan undangan resmi kepada masing-masing media. Namun, jika waktu tidak memungkinkan dengan undangan maka undangan melalui grup Whatsapp. Tujuan dari Diskominfo kabupaten kudus dalam mengundang media adalah agar informasi yang diberikan Pemkab Kudus melalui jumpa pers dapat dipublikasikan di platform masing-masing media sehingga dapat semakin dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Secara resmi melalui undangan, tetapi apabila karena waktu yang tidak memungkinkan dengan undangan, maka melalui WAG media yang sudah ada. Tujuan mengundang media adalah agar informasi yang diberikan Pemkab Kudus melalui jumpa pers dapat dipublikasikan di platform masing-masing media sehingga dapat semakin dijangkau oleh masyarakat”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Guna mengoptimalkan komunikasi publik terkait Covid-19, Diskominfo melakukan jumpa pers kepada media yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan informasi. Materi yang disampaikan kepada media adalah program maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menangani penyebaran Covid-19. Narasumber utama adalah Bupati Kudus selaku pengambil kebijakan dan didampingi oleh juru bicara Gugus Tugas Covid-19 di Kudus, dr. Andini Aridewi. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Jumpa pers dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Materi yang disampaikan adalah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menangani Covid-19. Narasumber utama adalah Bupati Kudus selaku pengambil kebijakan didampingi oleh dr. Andini Aridewi (juru bicara Gugus Tugas Covid-19 di Kudus)”

(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Dibawah ini merupakan contoh kegiatan jumpa pers yang dilakukan Pemkab Kudus dalam melakukan transparansi informasi terkait perkembangan Covid-19 di Kabupaten Kuus.



KUDUS - Pemkab Kudus menggelar konferensi pers Gugus Tugas Covid-19 guna mengumumkan perkembangan terakhir penanganan Covid-19. Acara berlangsung di Pendopo Kabupaten, Senin (11/5), dan dihadiri Plt. Bupati Kudus HM Hartono sebagai Ketua Gugus Tugas, dengan didampingi Juru Bicara Gugus Tugas Andini Aridewi

Gambar 3. 29 contoh kegiatan jumpa pers Pemkab Kudus terkait perkembangan terakhir penanganan Covid-19

<https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/gelar-konferensi-pers-gugus-tugas-laporkan-perkembangan-covid19>

Dalam mengatur alur komunikasi dari pejabat pemerintah Kudus kepada masyarakat, Diskominfo Kudus melaksanakan tugas pembantu berupa liputan dan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Kudus yang kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat Kudus melalui berbagai sosial media Diskominfo Kudus atau Pemkab Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai

berikut :

“Dalam mengatur alur komunikasi dari pejabat ke masyarakat, Diskominfo melaksanakan tugas pembantu berupa peliputan dan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Kudus yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai sosial media Diskominfo dan Pemkab Kudus” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Dalam menangani kasus Covid-19, terdapat stakeholder baik internal maupun eksternal yang turut mendukung. Adapun stakeholder internal adalah segenap elemen di pemerintahan Kabupaten Kudus (Bupati dan seluruh jajarannya). Sedangkan stakeholder eksternal adalah mitra pemerintah seperti masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pers, serta lembaga negara lainnya seperti DPR, TNI, dan Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Stakeholder internal adalah segenap elemen di Pemerintah Kabupaten Kudus (Bupati dan seluruh jajarannya). Stakeholder eksternal adalah mitra pemerintah yakni masyarakat; lembaga negara lainnya seperti DPR, TNI, Polri; organisasi kemasyarakatan; dan teman-teman pers” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Diskominfo Kabupaten Kudus telah menjalankan semua peran humas pemerintah menurut Cutlip, Center, dan Broom yang meliputi ahli komunikasi strategis, mengidentifikasi masalah, menjadi jembatan komunikasi antara lembaga dengan publiknya, serta menjadi alat lembaga dalam memecahkan krisis. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

<p style="text-align: center;">Peran Tenaga Humas Pemerintah (Cutlip, Center, Broom)</p>	<p style="text-align: center;">Apakah Diskominfo menjalankan Tugastersebut ? Jawab “Ya/Tidak”. Jika “Ya”, maka bagaimana bentuknya ?</p>
<p>Ahli komunikasi tanpa ada kontribusi yang signifikan dalam penciptaan ketetapan manajemen dan perencanaan strategis</p>	<p>Ya, dalam menghadapi isu tertentu, Diskominfo hanya menjadi corong penyampai dari pesan/kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tanpa turut serta dalam proses pembentukan kebijakan. Sebagai contoh dalam penanggulangan Covid-19, Diskominfo Kudus hanya berperan sebagai informan bagi masyarakat Kudus. Sedangkan penentu kebijakan adalah dari pusat</p>
<p>Ahli perumus yang memiliki tugas dalam mendeskripsikan masalah, menumbuhkan program, dan bertanggung jawab penuh atas praktiknya</p>	<p>Ya, dalam hal ini Diskominfo bertanggung jawab penuh sesuai tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menanggapi permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>
<p>Penyedia komunikasi yang memiliki tugas sebagai pendengar yang responsif dan menjadi mediator, interpreter, serta perantara antara publik dengan organisasi</p>	<p>Ya, dalam hal ini Diskominfo bertugas sebagai penerima aduan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial</p>
<p>Fasilitator pemecah masalah yang bekerja sama dengan manajer guna menjelaskan dan mencari solusi, serta sebagai anggota dari tim perencanaan strategis dari awal hingga evaluasi program</p>	<p>Ya, sama dengan tabel kedua.</p>

Tabel 3. 8 peran Diskominfo Kudus berdasarkan teori Cutlip, Center, dan Broom

Pemkab Kudus adalah pelayan masyarakat dan juga benteng terdepan dalam perang melawan COVID-19. Pemkab Kudus mempersilahkan masyarakat untuk menilai citra dari kinerja pemerintahan. Saran dan kritik yang masuk dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Pemkab Kudus untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki citra. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Pemkab Kudus adalah pelayan masyarakat dan juga benteng terdepan dalam perang melawan COVID-19. Pemkab Kudus mempersilahkan masyarakat untuk menilai citra dari kinerja pemerintahan. Saran dan kritik yang masuk dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Pemkab Kudus untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki citra”

(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat agar sampai kepada jajaran pemerintah atau pengambil keputusan, Diskominfo Kudus menjadikan media sosial serta koordinasi antar lembaga terkait sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada jajaran pemerintah untuk dikelola dan diperoleh jawaban untuk dipublikasi kembali kepada masyarakat yang mengadu melalui media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Diskominfo Kudus memanfaatkan media sosial serta koordinasi antar lembaga terkait sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada jajaran pemerintah untuk dikelola dan diperoleh jawaban untuk dipublikasi kembali kepada masyarakat yang mengadu melalui media sosial”

(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Selama Covid-19, terdapat beberapa aspirasi dari masyarakat yang telah ditampung oleh Diskominfo Kudus. aspirasi yang masuk meliputi pertanyaan seputar ketersediaan kamar di rumah sakit, ketersediaan tabung oksigen, ketersediaan vaksin. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Aspirasi yang masuk seperti ketersediaan tempat tidur di RS, ketersediaan tabung oksigen, ketersediaan vaksin, dll”

(Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Diskominfo telah memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat terkait Covid-19 karena setiap kebijakan maupun perkembangan terkait penanganan Covid-19 selalu disampaikan oleh Diskominfo Kudus kepada masyarakat melalui media sosial sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi

Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Ya (Diskominfo telah memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat), setiap kebijakan maupun perkembangan terkait penanganan COVID-19 selalu disampaikan oleh Diskominfo Kudus kepada masyarakat melalui sosial media sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” (Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Alur informasi yang disebarakan oleh Diskominfo kabupaten Kudus terkait covid-19 mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Kepala Diskominfo kabupaten Kudus selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas penyaluran informasi kepada masyarakat baik melalui kanal media sosial , media massa maupun website. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Pimpinan bertanggung jawab secara penuh terhadap semua aktivitas penyaluran informasi penanganan COVID-19. Semua aktivitas penyebaran informasi terkait Covid-19 mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Kepala Diskominfo” (Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Objektivitas jangka panjang dalam penanganan serta penyaluran informasi terkait covid-19 menjadi pertimbangan bagi diskominfo kabupaten Kudus dalam membuat kebijakan , karena itu keterbukaan informasi dan aspirasi berupa kritik juga mendapatkan ruang untuk disalurkan kepada pemerintah kabupaten Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Objektivitas jangka panjang dalam penanganan serta penyaluran informasi terkait covid-19 menjadi pertimbangan bagi diskominfo kabupaten Kudus dalam membuat kebijakan. Keterbukaan informasi dan aspirasi berupa kritik juga mendapatkan ruang untuk disalurkan kepada pemerintah kabupaten Kudus” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Diskominfo kabupaten Kudus menilai, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pasang surut sesuai dengan kondisi perkembangan covid-19 di kabupaten Kudus. Maka dari itu, Diskominfo kabupaten Kudus terus mengkomunikasikan informasi terkait Covid-19 kepada masyarakat kabupaten Kudus sebagai peringatan bahwa pandemi belum berakhir dan protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pasang surut sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19. Ketika kasus melandai, masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan. Di situlah tugas Diskominfo Kudus untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Ketidakpatuhan masyarakat kabupaten Kudus umumnya terjadi saat kasus Covid-19 di kabupaten Kudus menurun, contohnya adalah tidak memakai masker dan menggelar hajatan di tengah PPKM. Menindak hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) 41/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai dari teguran lisan, sanksi administratif hingga denda. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Pembup Kudus telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai dari teguran lisan, sanksi administratif sampai pada denda. Contoh kasus tidak disiplin memakai masker, menggelar hajatan di tengah PPKM”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Dalam mengajak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan agar tidak mengulangi lagi, Diskominfo Kabupaten Kudus menyampaikan, pemerintah kabupaten Kudus terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan. Contohnya adalah, saat melakukan pengawasan di tempat umum seperti jalan raya atau pasar petugas menemukan warga yang tidak menggunakan masker maka warga tersebut akan diingatkan untuk memakai maskernya. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Pertama dengan pendekatan persuasif melalui penyampaian informasi, data dan fakta yang terjadi selama pandemi. Pelanggaran yang pernah terjadi adalah saat melakukan pengawasan di tempat umum seperti jalan raya atau pasar petugas menemukan warga yang tidak menggunakan masker maka warga tersebut akan diingatkan untuk memakai maskernya”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)

Merebaknya disinformasi terkait Covid-19 tentunya menjadi perhatian bagi Diskominfo kabupaten Kudus, seperti yang pernah terjadi sebelumnya mengenai isu bahwa Covid-19 tidak ada dan mengenai kehalalan vaksin. Media sosial menjadi akses yang mudah bagi Diskominfo kabupaten Kudus untuk menghimpun informasi palsu yang beredar sehingga mudah untuk dikelola dan disampaikan kebenarannya kepada masyarakat kabupaten Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Tentunya (terdapat disinformasi di masyarakat mengenai Covid-19), seperti isu

bahwa COVID-19 tidak ada atau vaksin haram. Informasi ini hoaks ini menyebar di media sosial sehingga cukup mudah mendapatkan informasi tersebut” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Keterangan dari para ahli serta tokoh masyarakat kabupaten Kudus turut menjadi perantara Diskominfo kabupaten Kudus dalam meluruskan informasi palsu yang beredar di tengah masyarakat kabupaten Kudus terkait Covid-19, seperti saat isu vaksin haram merebak maka Diskominfo kabupaten Kudus menghimpun informasi dari tokoh agama serta Dinas Kesehatan sehingga data yang disampaikan kepada masyarakat adalah data yang faktual serta dapat mengklarifikasi disinformasi yang beredar. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Dengan memberikan informasi dan data faktual, melibatkan para ahli dan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk turut serta menjadi perantara Diskominfo dalam mengklarifikasi hoaks. Seperti saat isu vaksin haram merebak maka Diskominfo kabupaten Kudus menghimpun informasi dari tokoh agama serta Dinas Kesehatan sehingga data yang disampaikan kepada masyarakat adalah data yang faktual” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Informasi palsu yang beredar terkait vaksin menyebabkan masyarakat kabupaten Kudus terpetakan menjadi pro dan kontra terhadap vaksinasi, untuk itu Diskominfo kabupaten Kudus berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dari informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya melalui kampanye vaksin dan protokol kesehatan bekerjasama dengan pakar serta lembaga yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di kabupaten Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi Dzil Fahmi selaku Staff Pranata Humas Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

“Ya (informasi palsu mengenai Covid-19 menyebabkan masyarakat terpetakan menjadi pro dan kontra). Diskominfo Kudus bekerjasama dengan berbagai stakeholder terus mengkampanyekan pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat yang berpendapat kontra akibat dari hoaks dan disinformasi yang ia peroleh dari sumber-sumber tidak bertanggung jawab” (Hasil wawancara dengan Rifqi, 6 Juni 2022)

Kepala Diskominfo Kabupaten Kudus menambahkan bahwa tugas Diskominfo adalah sebagai Lembaga penyalur informasi publik, sehingga pendampingan serta komunikasi secara langsung dengan pasien Covid-19 maupun dengan pasien pasca sembuh adalah diluar tugas diskominfo. Hal tersebut disampaikan oleh Ery Rahayu, S.Sos selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kudus dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut :

*“Tidak. Kami hanya sebagai penyalur informasi publik saja, sehingga itu bukan tugas kami untuk melakukan komunikasi langsung dengan pasien Covid-19 maupun pendampingan dengan pasien pasca sembuh”
(Hasil wawancara dengan Ery, 6 Juni 2022)*

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama ditulis oleh Cristian dkk pada tahun 2021 berjudul Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado dalam Penanganan Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut adalah komunikasi publik yang dilakukan Pemkot Manado dalam penanganan Covid-19 antara lain keterbukaan informasi, memanfaatkan fitur siaran langsung di media sosial serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat, melakukan siaran keliling, dan koordinasi dengan lintas departemen. Pemkot Manado mengoptimalkan fitur siaran langsung dalam sosial media Instagram dan Facebook dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik. Konsekuensi metode tersebut adalah adanya *noise* dalam koneksi media sosial. Sementara, berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Kudus berupaya melakukan keterbukaan informasi seputar Covid-19 melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, website serta publisitas melalui siaran pers. Melalui media tersebut, Diskominfo Kudus terus membagikan data terbaru terkait perkembangan Covid-19 di Kudus seperti jumlah kasus terbaru, situasi Covid-19 di Kudus, hingga perkembangan Covid-19 di Kudus. Mengingat sasaran komunikasi publik Diskominfo Kudus terdapat masyarakat yang belum mengakses media sosial, maka komunikasi yang dibangun oleh Diskominfo Kudus adalah dengan cara tatap muka yakni sosialisasi keliling desa menyampaikan informasi terkait Covid-19 menggunakan mobil dan pengeras suara bekerja sama dengan TNI dan Polri. Selain itu, Diskominfo Kudus juga melakukan pemasangan baliho dan spanduk berisi informasi Covid-19 agar dapat dipahami oleh kalangan yang belum mengakses media sosial. Selain itu, Diskominfo Kabupaten Kudus juga melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat baik dari kalangan pemuka agama maupun lembaga swadaya masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya covid-19 serta meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Contohnya adalah ketika isu vaksin haram merebak maka Diskominfo Kabupaten Kudus menggandeng tokoh agama untuk meluruskan informasi tersebut. Dari sisi internal, berdasarkan temuan penulis menemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Kudus melakukan koordinasi lintas departemen dalam penanganan Covid-19, seperti terkait ketersediaan kamar rumah sakit dan tabung oksigen akan dikoordinasikan

dengan pihak rumah sakit atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Dalam aktivitas komunikasi publik, Diskominfo Kudus tidak menggunakan fitur siaran langsung dari media sosial seperti yang dilakukan Pemkot Manado. Keunggulan Diskominfo Kudus tidak menggunakan metode siaran langsung adalah besar kemungkinan terjadi gangguan jaringan sehingga akan mengalami banyak *noise* dari segi suara maupun visual sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak dapat diterima secara optimal. Terbukti bahwa *noise* tersebut telah dirasakan oleh Pemkot Manado dalam evaluasi komunikasi publik.

Penelitian kedua ditulis oleh Euis dkk pada tahun 2021 berjudul Peranan PR dalam Sosialisasi Program Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini adalah Humas Pemkot Bekasi telah menjalankan perannya sesuai teori Cutlip & Broom sebagaimana mestinya, meliputi teknisi komunikasi, fasilitator komunikasi, penasehat ahli dan pemecah masalah dalam sosialisasi vaksin Covid-19. Diskominfo Kudus berperan sebagai teknisi komunikasi sesuai teori Cutlip, yakni Diskominfo tidak andil dalam proses penetapan kebijakan, namun Diskominfo Kudus menjadi gerbang informasi atau informan untuk masyarakat terkait pesan/kebijakan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kudus atau pemerintah pusat. Diskominfo Kudus dalam perannya sebagai fasilitator komunikasi bertugas sebagai pihak yang responsif dalam interaksi kepada masyarakat serta menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah, seperti dalam praktek Diskominfo mengumpulkan aduan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial kemudian akan di respon berdasarkan data valid atau setelah mendapatkan data dari pihak yang berkaitan dengan pertanyaan dari masyarakat. Peran Diskominfo Kudus sebagai penasehat ahli dalam hal ini bertanggung jawab penuh sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menanggapi permintaan informasi dari masyarakat sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peran Diskominfo Kudus sebagai fasilitator pemecah masalah terlihat sebagai anggota Satgas Covid-19, Diskominfo Kudus menyampaikan informasi terkait kendala, masalah atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada tim Satgas Covid-19 agar dapat dijadikan bahan evaluasi. Humas pemerintah Bekasi mengidentifikasi isu vaksinasi yang berkembang di media sosial bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait yaitu Dinas Kesehatan Bekasi untuk menentukan informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Hasil dari informasi tersebut akan dibagikan melalui media sosial serta komunikasi dua arah melalui hotline dan Whatsapp resmi humas kota Bekasi untuk menjawab keluhan

langsung masyarakat terkait Covid-19. Hal serupa dilakukan oleh Diskominfo kabupaten Kudus untuk mengatasi isu yang timbul ditengah pandemi, isu yang beredar yakni vaksin haram serta isu hoax lonjakan Covid-19 di Kabupaten Kudus. Untuk meluruskan informasi tersebut, Diskominfo melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui pemuka agama dengan tujuan menjelaskan bahwa vaksin boleh digunakan untuk mencegah covid-19 serta memberikan klarifikasi melalui media sosial menyampaikan kebenaran terkait lonjakan kasus Covid-19 di Kudus sesuai data dari Dinas Kesehatan. Perbedaannya adalah berdasarkan temuan peneliti, Diskominfo kabupaten Kudus melakukan komunikasi publik melalui media sosial resmi pemerintah, media massa serta sosialisasi keliling desa. Diskominfo Kudus tidak menggunakan Whatsapp resmi Diskominfo Kudus dalam melakukan komunikasi publik terkait Covid-19.

Penelitian ketiga berjudul Strategi Komunikasi Humas Jabar Pada Masa Pandemi Covid-19 ditulis oleh Evi Novianti dkk tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi komunikasi oleh Humas Jawa Barat fokus pada konten dan media distribusi. Peran Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memiliki efek yang kuat terhadap integritas informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga mampu memberikan citra positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diskominfo Kudus juga mengoptimalkan peran Bupati Kudus sebagai komunikator utama yang memiliki kepercayaan dan atensi dari masyarakat. Maka dari itu, sebagian besar konten di media sosial resmi pemerintah terkait Covid-19 meletakkan foto Bupati Kudus serta banyak membagikan pernyataan seputar Covid-19 dan aktivitas penanganan Covid-19 yang dilakukan Bupati Kudus. Humas Jabar melakukan riset untuk mengetahui persepsi publik terkait penggunaan serta pengumpulan kebutuhan informasi masyarakat terkait Covid-19 di media sosial. Riset yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus adalah dengan mengumpulkan aspirasi serta pertanyaan dari masyarakat pada kolom postingan media sosial, aspirasi serta pertanyaan tersebut dapat diolah menjadi bahan publikasi selanjutnya terkait Covid-19 bagi Diskominfo Kabupaten Kudus. Berdasarkan temuan penulis, perbedaan komunikasi publik antara Humas Jabar dengan Diskominfo Kudus adalah penggunaan tagar sebagai kunci utama pesan oleh Humas Jabar, diantaranya #WaspadaCovid19, #JabarTanggapCovid19 dan #AdaptasiKebiasaanBaru. Sementara Diskominfo Kudus tidak menggunakan tagar khusus dalam komunikasi publik penanganan Covid-19 melalui media online. Penggunaan tagar sendiri berfungsi untuk mengelompokkan konten dan memudahkan pencarian informasi seputar Covid-19

serta dapat digunakan untuk melakukan kampanye lintas platform terkait Covid-19, seperti konten kampanye Covid-19 yang di posting di Instagram menggunakan hastag akan ditemukan juga di Twitter maupun Facebook sehingga banyak masyarakat yang akan mengetahui kampanye yang dilakukan.

Penelitian keempat berjudul Strategi Komunikasi Eksternal PR Pemerintah Kota Salatiga di Masa Pandemi Covid-19 ditulis oleh Tarra dan Lina tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan strategi komunikasi publik yang dilakukan Humas Pemkot Salatiga dalam penanganan Covid-19 adalah melalui siaran keliling; layanan pusat informasi Covid-19; pemanfaatan media sosial Instagram, Youtube, Facebook dan Twitter; siaran radio; dan pemasangan videotron. Berdasarkan temuan penulis, ditemukan bahwa Diskominfo Kudus melakukan metode serupa dalam mengkomunikasikan informasi terkait covid-19 yakni secara luring dan daring, Hal tersebut dikarenakan publik sasaran dari Diskominfo Kabupaten Kudus harus dijangkau secara menyeluruh dari semua kalangan terutama masyarakat yang belum memiliki akses media sosial dan berita online, maka komunikasi dilakukan secara luring untuk mendukung dan melengkapi metode daring yang belum mampu mencapai kelompok sasaran tersebut. Namun, perbedaannya adalah Diskominfo Kudus tidak melakukan komunikasi publik melalui Youtube dan pemasangan videotron.

Penelitian kelima berjudul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik terkait dengan Penanggulangan Covid-19 (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun Instagram Dinas Kominfo Bangka Belitung) ditulis oleh Sofian dan Septia pada tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan komunikasi publik penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah Bangka Belitung melalui akun Instagram Diskominfo Bangka Belitung sangat bermanfaat sebagai penyalur informasi antara pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan temuan penulis, ditemukan bahwa perbedaan komunikasi publik terletak pada pengelolaan sosial media. Aktivitas komunikasi pemerintah Bangka Belitung dilakukan melalui akun sosial media Diskominfo Bangka Belitung yakni @diskominfobabel sebagai kanal resmi pemerintah tunggal. Sementara Pemkab Kudus dan Diskominfo Kudus memiliki akun sosial media yang berbeda walaupun sama-sama dikelola oleh Diskominfo Kudus yakni atas nama @diskominfoKudus serta @pemkabKudus dalam akun Instagramnya. Diskominfo Kudus juga melakukan komunikasi secara offline untuk menjangkau target sasaran yang belum mengakses media sosial, hal tersebut tidak dilakukan oleh Diskominfo Bangka Belitung

yang hanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait Covid-19.

B. Analisis SWOT

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil temuan berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber dari Diskominfo Kabupaten Kudus dan masyarakat Kudus. Penjabaran akan penulis lakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat).

Pertama, penulis akan menjabarkan komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Kudus berdasarkan faktor strength dalam analisis SWOT dimana pada poin ini keunggulan yang dimiliki Diskominfo menjadi latar belakang keberhasilan komunikasi publik.

Keberhasilan komunikasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus tentunya tidak terlepas dari faktor keunggulan di sisi internal Pemerintahan Kabupaten Kudus serta strategi komunikasi yang disusun untuk mencapai kesepahaman dengan publik sasaran dalam mengatasi Covid-19 di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Kudus, dapat ditemukan bahwa keunggulan yang dimiliki Diskominfo Kudus dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik yakni dari segi pemilihan komunikator. Bupati sebagai komunikator utama dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga informasi yang disampaikan mendapat simpati serta kepercayaan dari masyarakat Kudus. Hal itu dikarenakan Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintah kabupaten Kudus dengan latar belakang intelektual yang memadai. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui segala aktivitas Bupati Kudus dalam menangani Covid-19 melalui sosial media Pemkab Kudus

Berdasarkan temuan wawancara penulis bersama Kabid Komunikasi Diskominfo Kudus, kyai atau tokoh agama yang dipilih oleh Pemkab Kudus sebagai komunikator juga turut melancarkan aktivitas komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Kudus terkait informasi seputar Covid-19. Terlebihsempat beredar di tengah masyarakat Kudus mengenai isu bahwa vaksin haram digunakan. Pada saat itu, tokoh agama menjadi sosok yang memiliki kredibilitas tinggi untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin halal dalam pandangan agama.

Diskominfo Kabupaten Kudus juga melakukan komunikasi publik melalui penggunaan media sosial yang optimal dalam memberikan informasi terkait Covid-19.

Informasi yang pada umumnya berisi tentang data sebaran serta kebijakan pemerintah tersebut mendapatkan respon yang beragam, seperti yang penulis sebutkan pada bab temuan bahwa media sosial yang digunakan oleh Diskominfo juga digunakan sebagai ruang aspirasi yang menampung reaksi publik dalam bentuk pertanyaan serta masukan terkait Covid-19 di Kabupaten Kudus.

Weakness atau kelemahan yang penulis temukan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Covid-19 adalah terbatasnya kewenangan dalam penyebaran informasi dimana konten yang dipublikasi merupakan himbauan dari pemerintah pusat yang dimodifikasi kedalam himbauan pemerintah daerah berupa mengganti tokoh dari pemerintah pusat menjadi Bupati Kudus. Sehingga informasi yang dipublikasi haruslah sesuai arahan pemerintah pusat dan timeline penyebaran tidak bisa dijadwalkan secara berkala.

Selain itu, penulis menemukan bahwa dalam komunikasi publik terkait Covid-19 di media sosial Diskominfo Kabupaten Kudus belum menggunakan tagar untuk mempermudah pencarian informasi terkait Covid-19 di media sosial sehingga publik belum dapat melakukan akses informasi dengan penggunaan tagar di media sosial Diskominfo Kabupaten Kudus.

Dari segi opportunities atau peluang berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, strategi yang dapat dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus adalah menggunakan Whatsapp resmi pemerintah sebagai media komunikasi secara dua arah dengan masyarakat Kudus untuk mendapatkan informasi seputar Covid-19. Penggunaan Whatsapp resmi diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak aktif di sosial media atau tidak dapat menyampaikan kendala dalam penerimaan pesan seputar Covid-19 melalui sosial media.

Selain itu, dalam penyampaian pesan melalui media sosial yang dapat dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus adalah dengan menggunakan tagar, karena tagar memiliki beberapa fungsi diantaranya dapat mengelompokkan konten sehingga mempermudah pencarian serta dapat digunakan untuk kampanye melalui sosial media.

Komunikasi Publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus tentu mengalami *threat* atau hambatan dari sisi eksternal, hambatan tersebut terjadi karena kurangnya akses publik sasaran untuk mendapatkan informasi terkait Covid-19. Kanal media sosial yang tidak mampu menjangkau publik sasaran tersebut mengakibatkan

Diskominfo Kabupaten Kudus selaku lembaga resmi Pemerintah harus melakukan komunikasi secara luring dengan dukungan serta koordinasi dengan aparat untuk berkeliling ke desa-desa yang masyarakatnya belum mengakses media sosial. Selain itu, faktor penghambat komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Covid-19 adalah beredarnya hoax di tengah masyarakat yang menimbulkan banyak persepsi terkait Covid-19. Keadaan tersebut menjadi hambatan dalam penyampaian pesan Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Covid-19 kepada Masyarakat Kudus.

Hambatan lain yang ditemukan Diskominfo Kudus dalam menjalankan komunikasi publik Covid-19 adalah pada saat melakukan aktivitas keliling desa, dimana kegiatan tersebut terkendala jarak titik lokasi yang cukup jauh serta waktu yang kurang efisien.



BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Bentuk Komunikasi Publik Diskominfo Kudus dalam Penanganan Covid-19

Dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus, Diskominfo Kudus memiliki beberapa bentuk komunikasi publik yang dilakukan. Yang pertama ialah sosialisasi/kampanye serta keterbukaan informasi terkait Covid-19 yang disebarakan melalui media sosial resmi Diskominfo Kudus dan Pemerintah Kabupaten Kudus meliputi website diskominfo.kuduskab.go.id dan kuduskab.go.id , Instagram @diskominfokudus dan @pemkabkudus , Facebook Media Dinas Kominfo Kudus dan Pemkab Kudus, serta Twitter @DiskominfoKudus dan @Pemkab_Kudus.

Selain media sosial, Diskominfo Kudus juga melakukan aktivitas komunikasi publik dengan melangsungkan patroli lingkungan ke desa- desa menggunakan mobil dan pengeras suara guna menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sosial media. Pada saat Kudus mengalami zona hitam, Diskominfo Kudus bersama Satgas Covid- 19 pusat, TNI, Polri, dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sepakat melakukan patroli lingkungan dan penyemprotan desinfektan selama kurang lebih satu bulan (Juni-Juli 2021).

Selain melakukan patroli keliling, guna menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sosial media, Diskominfo Kudus melakukan pemasangan baliho dan spanduk dengan pesan terkait kampanye protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 di beberapa titik strategis yakni di alun-alun Kudus serta kantor-kantor pemerintahan.

Siaran pers juga menjadi salah satu aktivitas komunikasi publik Diskominfo Kudus untuk memfasilitasi kebutuhan informasi publik terkait Covid-19 di Kabupaten Kudus. Tugas Diskominfo terkait aktivitas jumpa pers antara lain menyiapkan narasumber dan media, kebutuhan publikasi informasi, menentukan waktu pelaksanaan jumpa pers, mengkoordinir narasumber , mengundang media,

serta menyiapkan lokasi pelaksanaan jumpa pers. Narasumber utama dalam pelaksanaan jumpa pers adalah Hartopo, Bupati Kudus selaku pengambil kebijakan dan didampingi oleh juru bicara Gugus Tugas Covid-19 di Kudus, dr. Andini Aridewi.

- Proses Penyusunan Komunikasi Publik Diskominfo Kudus

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Kudus menyusun komunikasi publik dengan mengolah informasi yang diterima dari pemerintah pusat baik terkait himbauan protokol kesehatan serta kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait Covid-19.

Informasi dari pemerintah kabupaten Kudus terkait Covid-19 akan dirilis oleh Diskominfo Kabupaten Kudus dalam bentuk konferensi pers dengan mengundang media massa lokal dan nasional dengan tujuan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Kudus. Informasi tersebut juga dipublikasi oleh Diskominfo Kabupaten Kudus melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan website sebagai media komunikasi yang interaktif dengan masyarakat Kudus.

- Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Publik DiskominfoKudus

Keberhasilan komunikasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus tentunya tidak terlepas dari faktor keunggulan di sisi internal Pemerintahan Kabupaten Kudus serta strategi komunikasi yang disusun untuk mencapai kesepahaman dengan publik sasaran dalam mengatasi Covid-19 di Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa keunggulan yang dimiliki Diskominfo Kudus dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik yakni dari segi pemilihan komunikator. Bupati sebagai komunikator utama dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga informasi yang disampaikan mendapat simpati serta kepercayaan dari masyarakat Kudus. Kyai atau tokoh agama yang dipilih oleh Pemkab Kudus sebagai komunikator juga turut melancarkan aktivitas komunikasi Diskominfo Kudus dalam menangkal berita hoaks terkait Covid-19 yang berhubungan dengan agama, seperti isubahwa vaksin haram digunakan. Selain itu, penggunaan media sosial yang optimal dalam memberikan informasi terkait Covid-19 dapat menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pertanyaan seputar Covid-19 kepada pemerintah kabupaten Kudus.

Kelemahan yang penulis temukan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Covid-19 adalah terbatasnya kewenangan dalam penyebaran informasi dimana konten yang dipublikasi merupakan himbauan dari pemerintah pusat yang dimodifikasi kedalam himbauan pemerintah daerah berupa

mengganti tokoh dari pemerintah pusat menjadi Bupati Kudus. Sehingga informasi yang dipublikasi haruslah sesuai arahan pemerintah pusat dan timeline penyebaran tidak bisa dijadwalkan secara berkala. Selain itu, dalam aktivitas komunikasi publik di media sosial, Diskominfo Kabupaten Kudus belum menggunakan tagar untuk mempermudah pencarian informasi terkait Covid-19 di media sosial sehingga publik tidak dapat akses informasi dengan penggunaan tagar di media sosial.

Hambatan Diskominfo Kudus dalam melakukan komunikasi publik terkait Covid-19 adalah tidak semua masyarakat Kudus memiliki akses terhadap media sosial, sedangkan informasi terkait Covid-19 dari pemerintah harus sampai ke semua masyarakat Kudus. Mengatasi hambatan tersebut, Diskominfo Kudus melakukan komunikasi secara luring bersinergi dengan aparat untuk berkeliling ke desa-desa menyampaikan informasi terkait Covid-19, meskipun kegiatan tersebut terkendala jarak titik lokasi yang cukup jauh serta waktu yang kurang efisien. Selain itu, faktor penghambat komunikasi publik Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Covid-19 adalah beredarnya hoax di tengah masyarakat yang menimbulkan banyak persepsi terkait Covid-19. Keadaan tersebut menjadi hambatan dalam penyampaian pesan Diskominfo Kabupaten Kudus terkait Covid-19 kepada masyarakat Kudus.

B. Keterbatasan Penelitian

Kendala yang penulis alami dalam penelitian ini adalah keterbatasan wawancara yang dilakukan via *personal chat* Whatsapp sehingga penulis tidak dapat mengajukan pertanyaan secara mendalam pada saat wawancarabersama narasumber.

C. Saran

- Saran Praktis untuk Diskominfo Kabupaten Kudus

Pertama, guna memastikan segala aduan mengenai kendala atau pertanyaan terkait Covid-19 telah disampaikan oleh masyarakat, Diskominfo Kabupaten Kudus dapat menggunakan Whatsapp resmi pemerintah sebagai media komunikasi dua arah dengan masyarakat Kudus. Penggunaan Whatsapp resmi diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak aktif di sosial media atau tidak dapat menyampaikan kendala dalam penerimaan pesan seputar Covid-19 melalui sosial media.

Kedua, dalam aktivitas komunikasi publik melalui media sosial, Diskominfo Kabupaten Kudus dapat menggunakan tagar di setiap postingan, karena tagar memiliki

beberapa fungsi diantaranya dapat mengelompokkan konten sehingga mempermudah pencarian informasi terkait Covid-19 serta dapat digunakan untuk kampanye Covid-19 melalui sosial media.

- Saran Akademis

- Penulis harap pada penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara serta observasi yang lebih mendalam bagaimana strategi komunikasi publik yang dijalankan
- Penelitian selanjutnya dapat lebih bervariasi mengenai komunikasi publik yang dijalankan Diskominfo Kudus atau Pemerintah Kabupaten Kudus. Tidak hanya dalam penanganan Covid-19, tetapi juga dalam komunikasi krisis lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arni, Muhammad. 2015. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: BumiAksara. Cet ke 14
- Cangara, Hafied. 2008. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Cutlip, Scott M., Center., Broom. 2009. *Effective public relations*. Jakarta: Kencana
- Depdagri-LAN. 2007. *Modul kebijakan pelayanan publik, diklat teknis pelayanan publik, akuntabilitas dan pengelolaan mutu (public service delivery, accountability and quality management)*. Jakarta: LAN
- Firmanzah. 2007. *Marketing politik antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Greener, Tony. 2011. *Practical PR*. Jakarta: PT Gramedia WidiaSarana Indonesia, hal.8
- Mani, La., Budi Guntoro. 2020. *Budaya dan desain komunikasi kebijakan publik: teori dan contoh kasus aplikasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muktiyo, Widodo. 2020. *Strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik pemerintah terkait penanggulangan pandemi covid-19*. Bogor: Halaman Moeka
- Mulyana, Deddy. 2016. *Health and therapeutic communication: an intercultural perspective*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nilasari, Betty Wahyu. 2012. *Humas pemerintah*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Pearson, Judy C., Paul E Nelson., dkk. 2009. *Ispeak: public speaking for contemporary life*. New York: McGraw-Hill Higher Education
- Saputra, Wahidin., Rulli Nasrullah. 2011. *Public relations 2.0: teori dan praktik public relations di era cyber 2000*. Depok: Gramata Publishing
- Subandriyo, Budi. 2020. *Bahan ajar teknik komunikasi publik*. Jakarta: Badan Pusat Statistika
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Suprawoto. 2018. *Government public relations: perkembangan dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

JURNAL

- Amin, M., & Hadiyat, Y. D. (2020). Penilaian keberhasilan komunikasi publik oleh humas pemerintah melalui sistem informasi penanganan covid-19 di kota makassar. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi danPembangunan) Vol.21 No.2* , 180-183
- Darma, Asril., Suyanto. (2020). Komunikasi pemerintahan memanfaatkan cyber public relations oleh pemerintah provinsi riau pada era disruptif. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.9 No.4*
- Jacobsen, Kathryn H., Emily K Vraga. (2020). Improving communication about covid-19 and emerging infectious diseases. *European Journal of Clinical Investigation Vol.50 No.5*
- Novianti, E., Nugraha, A. R., & Sjoraid, D. F. (2020). Strategi komunikasi humas jawa barat pada masa pandemi covid19. *ISSNNo.2615-3505 Vol.15 No.3*, 4195-4198.
- Sulistiani, T. N., & Wijaya, L. S. (2021). Strategi Komunikasi Eksternal Public Relations Pemerintah Kota Salatiga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media dan Cinema Vol.4 No.1*, 25.
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 7 No. 3*

MAKALAH ILMIAH

Tulung, Freddy. 2020. Strategi komunikasi publik dalam mendukungvaksinasi covid-19. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

ARTIKEL

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5601418/habis-habisan-diamuk-corona-bupati-kudus-ungkap-penyebabnya? ga=2.200744622.147648725.1635679996-991713722.1635679996>

<https://www.jpnn.com/news/koalisi-masyarakat-sipil-beber-kegagalan-pemerintah-tangani-corona>

<https://news.detik.com/kolom/d-5608266/refleksi-atas-fenomena-covid-19-di-kudus>

<https://www.beritasatu.com/archive/806355/kudus-berhasil-tangani-covid19->

berkat-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta

kominfo.go.id

GAMBAR :

<https://jateng.antaranews.com/berita/318476/kepatuhan-masyarakat-kudus-terhadap-protokol-kesehatan-meningkat>

<https://www.harianbhirawa.co.id/bed-occupancy-rate-kabupaten-kudus-turun-dari-96-persen-jadi-15-persen/> <https://jateng.antaranews.com/berita/442393/kudus-tingkatkan-vaksinasi-meski-sudah-capai-9441-persen>







PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No. 9 Telp. (0291) 438713
Website : diskominfo@kuduskab.go.id Email : kominfo@kuduskab.go.id

KUDUS 59313

Kudus, 2 Agustus 2022

Nomor : 045.2/780/18.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah melakukan Penelitian.

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu
Budaya Sosial Universitas Islam
Indonesia
di-
Yogyakarta

Melalui surat ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa/berikut :

Nama : Lensa Khoirul Jannah Sonida
Nomor Induk Mhs : 18321177
Perguruan tinggi : Universitas Islam Indonesia (Program Studi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya)

telah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang mewakili instansi kami, sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan yang berjudul :

"Strategi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus dalam Penanganan Covid-19"

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI



PEDOMAN WAWANCARA

Dinas/Instansi : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**
Nama : **Ery Rahayu, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Kudus**

1. Diskominfo memakai yang mana saja dalam strategi diatas ? (jika memang ada yang tidak digunakan, tidak perlu ditulis semuanya) Contoh bentuk pesan dari strategi yang digunakan ? Mengapa menggunakan strategi itu?

Strategi komunikasi publik yang kami lakukan lebih bersifat instruksional, yang dilakukan secara daring (media sosial) maupun luring (patroli lingkungan bersama pihak terkait). Digunakannya pendekatan instruksional dikarenakan sifat dari pendekatan ini yang paling cocok dengan tugas dan fungsi Diskominfo Kudus. Adapun 3 pendekatan lainnya yang di dalamnya melibatkan masyarakat/sukarelawan, membuat regulasi dan melakukan penegakan atas regulasi tersebut tidak kami gunakan karena wewenang tersebut berada pada OPD lain (Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dll.). Contoh pesan yang digunakan adalah dengan mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti gambar berikut:



2. (Dalam wawancara pertama, muncul beberapa komunikator komunikasi publik, yakni Bupati, Sekda, dan tokoh agama) Maka Bupati tampil pada informasi apa, sekda tampil pada informasi apa, tokoh agama tampil pada informasi apa ?

Bupati Kudus selaku figur utama dan panglima dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus selalu hadir dalam setiap informasi terkait penanganan COVID-19 seperti dalam imbauan pelaksanaan protokol kesehatan, dalam informasi atas kebijakan PPKM, maupun dalam sidak penanganan COVID-19 di lapangan. Adapun Sekretaris Daerah memiliki tugas utama membantu Bupati dalam urusan kebijakan administratif dan koordinasi perangkat daerah dalam penanganan COVID-19. Tokoh agama hadir dalam pesan-pesan yang terkait dengan isu

keagamaan seperti isu kehalalan vaksin, dan mengimbau kepada para jemaatnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan di rumah ibadah selama pandemi melanda.

3. Apa saja tema/topik yang diangkat dalam periode waktu tertentu?

Tema yang diusung oleh Diskominfo Kudus sejalan dengan tema yang diusung oleh pemerintah pusat seperti pelaksanaan prokes 3M dan turunannya (5M dan 3T), pesan terkait PPKM, imbauan untuk tidak mudik, informasi terkait vaksinasi, dll.

4. Apa upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan analisis isu-isu di masyarakat yang muncul semasa Covid? Apa penyebab isu tersebut muncul di masyarakat? Dan bagaimana cara Diskominfo memperoleh informasi isu tersebut?

Diskominfo Kudus hanyalah satu dari banyak bagian dalam proses penanganan COVID-19. Oleh karenanya dalam mengumpulkan informasi dan menangani isu (hoaks & disinformasi) yang berkembang di masyarakat, Diskominfo Kudus bekerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Kudus hingga level terbawah. Diskominfo Kudus selaku bagian dari Pemerintah Kabupaten Kudus juga bekerjasama dengan instansi lain seperti TNI dan Polri, maupun ormas/LSM. Selain itu Diskominfo Kudus juga melakukan patroli media sosial guna merangkum isu-isu yang beredar di masyarakat. Contoh isu yang muncul selama pandemi adalah terkait keabsahan COVID-19 yang diragukan sebagian masyarakat, dan isu terkait kehalalan vaksin.

5. Bagaimana pendekatan Diskominfo dalam memberikan solusi komunikasi terhadap problem isu yang beredar?

Dalam menangani isu yang beredar, Pemkab Kudus melalui Diskominfo selalu memperhatikan arahan dari pusat dan juga melibatkan para profesional dan orang yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Contoh kasus ketika isu kehalalan vaksin merebak, maka Pemkab Kudus menggandeng sejumlah tokoh agama terkemuka untuk turut serta dalam vaksinasi.

6. Apa saja isi pesan yang disampaikan Diskominfo?

Isi pesan yang kami sampaikan tentunya sejalan dengan instruksi dari pemerintah pusat, yakni terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan PPKM, dan menggalakkan pelaksanaan vaksin di Kabupaten Kudus.

7. Apa isi pesan utama dari Pemkab Kudus semasa Covid? Siapa yang merancang isi pesan tersebut?

Kita paham bahwa COVID 19 adalah wabah dunia, sehingga pesan utama dalam penanganan COVID-19 tentunya dirancang oleh pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan kearifan di masing-masing daerah. Adapun pesan utamanya tetap sama, yakni terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan PPKM, dan menggalakkan pelaksanaan vaksin.

8. Apa problem yang diprediksi muncul dalam menyampaikan pesan?

Prediksi atas masalah yang timbul dalam penyampaian pesan adalah jangkauan pesan, penerimaan dari masyarakat atas pesan tersebut, dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di saat pandemi berlangsung.

9. Apa saja narasi yang dirancang oleh Kominfo Kudus? Pihak mana atau bidang apa yang menentukan narasi yang dipakai?

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena masalah yang dihadapi sama, maka narasinya pun sama, dengan sedikit modifikasi sesuai dengan nilai yang ada di daerah tersebut. Di Dinas Kominfo yang memiliki tupoksi dalam merancang pesan-pesan adalah bidang

komunikasi dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis maupun persetujuan oleh Pimpinan Daerah.

10. Bagaimana proses menyusun narasi pesan Pemerintah/Diskominfo Kudus? Apakah ada yang khas ?

Prinsip narasi dalam penanganan COVID 19 hampir sama. Kekhasan yang ada hanya menterjemahkan program “Jogo Tonggo” dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jogo Tonggo sendiri merupakan interpretasi dari narasi pemerintah pusat dalam upaya penanganan COVID-19 yang kemudian disesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di Jawa Tengah.

11. Apa saja narasi yang diberikan pemerintah pusat ?

Narasi dari pemerintah pusat adalah penegakan protokol kesehatan (3M atau 5M, dan 3T), penerapan PPKM sebagai upaya menghambat laju penyebaran COVID-19, dan vaksinasi.

12. Bagaimana upaya Pemkab Kudus mengadopsi isi pesan/narasi yang ada dari pusat? Apakah menerima secara bulat dari pusat atau ada modifikasi ?

Modifikasi dilakukan oleh Pemkab Kudus disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi masyarakat Kudus.

13. Jika Diskominfo melakukan modifikasi pesan dari pusat, bagaimana bentuknya ? seperti dengan bahasa Jawa, bahasa keagamaan, dll.

Sama dengan jawaban No. 12.

14. Apa tujuan komunikasi publik pemerintah Kudus terkait Covid? Dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan tujuan komunikasi publik tersebut ?

Tujuan dari komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah guna memastikan informasi terkait kebijakan yang diambil selama pandemi tersampaikan kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (memutus rantai COVID-19). Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Kudus melibatkan setiap pihak termasuk TNI-Polri dan ormas keagamaan, dll.

15. Media apa saja yang digunakan dalam komunikasi publik beserta target sasarannya? seperti milenial untuk media yang mana, usia bapak2 ibu2 pakai yang mana, website untuk target siapa, dll. Kemudian apa pertimbangan menggunakan media tersebut untuk target yang dituju ?

Penggunaan media sosial dan website ditujukan kepada kelompok masyarakat yang melek teknologi seperti halnya generasi milenial. Adapun penyampaian pesan melalui patroli lingkungan ke desa-desa ditujukan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atas media sosial dan website seperti lansia ataupun kelompok masyarakat ekonomi rendah. Pertimbangan dalam menggunakan kedua metode tersebut disesuaikan dengan target yang ingin dituju. Media sosial dan website lebih familier bagi kaum milenial, sedangkan penyampaian informasi secara langsung dengan berkeliling ke desa-desa dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi.

16. Bagaimana pengelolaan tiap media online?

Disesuaikan dengan karakteristik platform media tersebut dan juga karakteristik pengguna media sosial tersebut. Untuk Facebook dan Instagram yang relatif leluasa dalam ketentuan postingannya, suatu informasi dapat kami sampaikan dalam satu post saja. Berbeda dengan Twitter yang dibatasi jumlah karakternya, maka informasi akan dibagi ke beberapa post (thread).

17. Kebijakan publik apa saja yang disampaikan Diskominfo melalui media online, yang diatur dalam Perda ? Perda nomor.. Tahun.. Tentang..

Semua program-program Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penanganan COVID 19 dipublikasikan di media online. Secara regulasi belum ada kebijakan Pemkab Kudus dalam pengaturan media online. Dalam hal penanganan COVID-19, salah satu kebijakan publik yang disampaikan melalui media online adalah instruksi bupati terkait pembentukan Satgas Jogo Tonggo seperti yang termuat dalam link berikut: <https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2343608185932455>.

18. Bagaimana Diskominfo menjangkau sasaran publik melalui media online tersebut ?

Dengan mengetahui karakteristik media sosial dan para penggunanya dan menampilkan pesan yang mudah dicerna oleh masyarakat sehingga pesan yang disampaikan tepat sasaran.

19. Bagaimana bentuk penyajian konten di tiap sosial media ? apakah disamakan semuanya atau dibedakan berdasarkan sasaran komunikasi ? misal website untuk informasi apa, Instagram untuk informasi apa, Facebook, Twitter, dll.

Tidak ada perbedaan dalam informasi yang disampaikan baik di website maupun di berbagai media sosial. Yang berbeda hanyalah kemasan dan cara penyajiannya yang disesuaikan dengan karakteristik platform yang digunakan dalam menyampaikan informasi.

20. Selain media online, apa saja bentuk aktivitas offline (tatap muka) yang dilakukan dalam komunikasi publik, seperti berkeliling, door to door, dan pemasangan spanduk, baliho, dll. ? dan berapa lama durasi dalam melakukan aktivitas tersebut ?

Komunikasi secara daring dilakukan melalui program patroli lingkungan yang bekerjasama dengan pihak TNI-Polri dengan berkeliling ke desa-desa untuk menyampaikan pesan terkait penegakan protokol kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu. Pemasangan baliho di berbagai titik strategis (alun-alun, kantor pemerintah di berbagai level, dll.) dengan pesan yang sama juga dilakukan selama masa pandemi.

21. Siapa audiens tatap muka ?

Dengan pertimbangan menghindari terjadinya kerumunan dan kepadatan aktivitas di masa pandemi, kegiatan di atas tidak dilakukan dengan format dialog, lebih kepada pemerintah berkeliling ke setiap sudut desa menggunakan mobil berpengeras suara untuk menyampaikan pesan terkait penanganan COVID-19. Audiens-nya adalah masyarakat luas.

22. Apa faktor kelebihan dan kekurangan tatap muka ?

Kelebihan dari kegiatan di atas adalah pesan/ informasi langsung tersampaikan ke masyarakat, sedangkan kekurangannya adalah kegiatan tersebut kurang efisien karena faktor jarak dan waktu.

23. Apa faktor pendukung dan penghambat tatap muka ?

Faktor pendukungnya adalah kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses atas media sosial akan informasi COVID-19 dan ketersediaan alat dan personil. Faktor penghambatnya adalah masalah lokasi dan waktu yang diperlukan.

24. Apa indikator keberhasilan komunikasi publik bisa tercapai ? dan bagaimana upaya agar target tersebut tercapai ?

Komunikasi publik, dalam hal ini adalah sosialisasi penanganan COVID-19, dapat dianggap berhasil ketika pesan yang disampaikan dapat sampai ke masyarakat yang ditunjukkan dengan

adanya perubahan perilaku di masyarakat (dengan makin meningkatnya penerapan protokol kesehatan & vaksinasi).



25. Biasanya komen yang masuk ke segala unggahan dari pemerintah Kudus, itu isinya apa saja?

Komentar, kritik, saran dan pertanyaan banyak masuk ke akun media sosial kami yang merupakan suatu kewajaran mengingat media sosial telah menjadi wadah baru bagi diskursus masyarakat. Contoh seperti ketika warga menanyakan tentang kebijakan PPKM, ketersediaan kasur di RS, ketersediaan tabung oksigen, jadwal dan lokasi vaksinasi, dll.

26. Komentar2 dari masyarakat yang muncul di media online akan diapakan ?

Komentar yang masuk ke akun media sosial kami akan kami segera teruskan kepada pihak-pihak (OPD) yang mengurus urusan yang disampaikan dalam komentar tersebut.

27. Contoh materi komunikasi publik dan materi tersebut tentang apa tentang ? (jawaban ini berbentuk lampiran foto/dokumentasi aktivitas komunikasi publik, desain poster, baliho, sosial media, dll. yang telah dijalankan)

<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2627218050904799>

<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2639618579664746>

<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2643317862628151>

<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2645814649045139>

<https://www.facebook.com/pemerintahkabkudus/posts/2680156992277571>

28. Apa evaluasi terkait komunikasi publik sejauh ini? Apa indikator yang digunakan untuk evaluasi?

Evaluasi komunikasi publik dalam penanganan COVID-19 dilakukan dengan melihat perubahan perilaku masyarakat terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan. Indikator dapat dilihat dari :

- Jumlah pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan operasi masker
- Data perkembangan covid (pengurangan/penambahan terkonfirmasi covid)

29. Apa faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo ? dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul ?

Faktor penghambat utama adalah jangkauan/ cakupan dari pesan dan informasi yang disampaikan mengingat informasi terkait penanganan COVID-19 ini harus dipastikan sampai ke setiap warga Kudus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka yang dilakukan adalah sinergi dengan setiap elemen yang ada di dalam pemerintahan (level pemerintah kabupaten hingga desa dan rt/rw) dan juga yang ada di luar pemerintahan seperti instansi lain (TNI-Polri) dan ormas keagamaan (NU-Muhammadiyah) dalam menyampaikan pesan tersebut.

30. Kondisi masyarakat dalam menghadapi fase COVID-19

a. Tiga bulan pertama: masyarakat masih beradaptasi dengan kehadiran COVID-19 di tengah kehidupan mereka, sehingga masih ditemui warga yang belum menjalankan protokol kesehatan. Oleh karenanya kami secara gencar mengampanyekan penegakan protokol kesehatan baik secara daring maupun luring

b. PPKM dan lonjakan kasus: pada fase ini, masyarakat makin sadar akan kondisi pandemi dan sangat kooperatif dalam pelaksanaan PPKM meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berkeberatan dengan kebijakan ini. Sebelum terjadi lonjakan kasus, kondisi pandemi di Kudus cukup terkendali yang kemudian diikuti dengan kehadiran bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang mengakibatkan peningkatan mobilitas masyarakat.

c. Kebijakan mudik: kebijakan ini disambut dengan berbagai respons dari masyarakat. Banyak yang mengurungkan niatnya untuk mudik, terlebih dengan adanya penyekatan di ruas-

ruas jalan penghubung antar daerah, tapi tentunya pemerintah tidak dapat sepenuhnya membendung para pemudik yang lolos dari penyekatan tersebut. Hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan di atas, berakibat pada meningkatnya mobilitas masyarakat berujung pada meningkatnya kasus.

d. **Vaksinasi:** masyarakat menyambut baik program vaksinasi, terutama setelah hoaks dan disinformasi terkait vaksinasi berhasil diklarifikasi. Pertanyaan terkait persyaratan, jadwal dan lokasi vaksinasi memenuhi kolom komentar media sosial milik Pemkab Kudus.

e. **Keterbatasan vaksinasi:** keterbatasan suplai vaksin tidak benar-benar dirasakan di Kudus. Di tengah animo yang besar dari masyarakat dalam program vaksinasi, Pemerintah Kabupaten Kudus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses vaksinasi tetap berlangsung dan bekerjasama dengan TNI-Polri serta perusahaan swasta untuk melaksanakan vaksinasi tersebut.

31. Bagaimana Diskominfo mengetahui kondisi masyarakat di fase yang telah dijelaskan di atas ?

Diskominfo tidak bekerja sendiri, fungsi Diskominfo dalam membantu Bupati Kudus melaksanakan tugas komunikasi dan informasi membuat Diskominfo memiliki akses terhadap informasi-informasi tersebut yang datang dari berbagai sumber (OPD terkait, lembaga negara yang lain, ormas, dll.).

32. Apakah dalam melancarkan komunikasi publik, Diskominfo/Pemkab Kudus juga memanfaatkan sosial media pribadi komunikator yang ditunjuk ? Jika iya, bagaimana pengelolaannya ?

Keputusan terkait komunikator yang dipilih dalam penanganan COVID-19 tidak hanya terletak pada Diskominfo, melainkan keputusan kolektif Pemerintah Kabupaten Kudus setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Komunikator utama adalah Bupati Kudus yang menyampaikan informasi penanganan COVID-19 melalui media sosial milik pemerintah kabupaten maupun melalui akun media sosial pribadinya. Adapun komunikator lain selain Bupati Kudus akan ditampilkan melalui akun media sosial milik pemerintah kabupaten.

33. Apa saja nama platform media yang telah diajak bekerja sama ? bentuk kerjasamanya seperti apa ?

Media cetak, elektronik, online.

34. Tugas Diskominfo berkaitan dengan media apa saja ? (platform media seperti koran, berita online, dll.)

Tugas Kominfo Media cetak, media penyiaran (LPPL Radio Kudus FM, kontributor tv swasta di daerah maupun tv nasional) dan media online terkait publikasi program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus.

35. Apa materi informasi yang disediakan Diskominfo kepada media? berapa kali ada jumpa pers ? siapa narasumber yang dihadirkan ?

Jumpa pers dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Materi yang disampaikan adalah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Narasumber utama adalah Bupati Kudus selaku Pengambil Kebijakan didampingi dari Diknas Teknis sesuai dengan tema Jumpa pers.

36. Bagaimana Pemkab/Diskominfo mengatur alur komunikasi dari pejabat pemerintah Kudus kepada masyarakat ?

Dalam konteks Bupati Kudus, Diskominfo melaksanakan tugas pembantu berupa peliputan dan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Kudus yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media.

37. Siapa saja yang menjadi stakeholder internal dan eksternal ?

Stakeholder internal adalah segenap elemen di Pemerintah Kabupaten Kudus (Bupati dan seluruh jajarannya). Stakeholder eksternal adalah mitra pemerintah yakni masyarakat; lembaga negara lainnya seperti DPR, TNI, Polri, dll.; dan juga organisasi kemasyarakatan; dan teman-teman pers.

38.

<p>Peran Tenaga Humas Pemerintah (Cutlip, Center, Broom)</p>	<p>Apakah Diskominfo menjalankan Tugas tersebut ? Jawab “Ya/Tidak”. Jika “Ya”, maka bagaimana bentuknya ?</p>
<p>Ahli komunikasi tanpa ada kontribusi yang signifikan dalam penciptaan ketetapan manajemen dan perencanaan strategis</p>	<p>Ya, dalam menghadapi isu tertentu, Diskominfo hanya menjadi corong penyampai dari pesan/kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus tanpa turut serta dalam proses pembentukan kebijakan. Contoh: proyek transformasi ojek becak menara Kudus menjadi ojek motor, yang mana Diskominfo hanya berperan sebagai informan bagi masyarakat luas. Sedangkan kebijakan yang diambil lebih pada peran OPD teknis</p>
<p>Ahli perumus yang memiliki tugas dalam mendeskripsikan masalah, menumbuhkan program, dan bertanggung jawab penuh atas praktiknya</p>	<p>Ya, dalam hal ini Diskominfo bertanggung jawab penuh sesuai tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menanggapi permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>
<p>Penyedia komunikasi yang memiliki tugas sebagai pendengar yang responsif dan menjadi mediator, interpreter, serta perantara antara publik dengan organisasi</p>	<p>Ya, dalam hal ini Diskominfo bertugas sebagai penerima aduan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SIMPONI milik Pemkab Kudus, LapoGub milik Pemprov Jawa</p>

	Tengah, dan SP4N Lapor! Milik pemerintah pusat.
Fasilitator pemecah masalah yang bekerja sama dengan manajer guna menjelaskan dan mencari solusi, serta sebagai anggota dari tim perencanaan strategis dari awal hingga evaluasi program	Ya, sama dengan tabel kedua.

39. Bagaimana Diskominfo membangun citra & reputasi selama COVID ?

Diskominfo Kudus menjalankan tugas pembantu terkait komunikasi dan informasi yang ditunjukkan dengan kerja Diskominfo Kudus dalam menyampaikan semua kebijakan Pemkab Kudus terkait penanganan COVID-19, sekaligus juga sebagai media informasi terkait perkembangan COVID-19.

40. Bagaimana pihak Pemkab Kudus memandang citra mereka di masyarakat selama COVID ?

Pemkab Kudus adalah pelayan masyarakat dan juga benteng terdepan dalam perang melawan COVID-19. Pemkab Kudus mempersilahkan masyarakat untuk menilai citra dari kinerja pemerintahan. Saran dan kritik yang masuk dari masyarakat akan menjadi bahan bagi Pemkab Kudus untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, bukan untuk memperbaiki citra.

41. Bagaimana upaya Diskominfo dalam menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara publik dan pemerintah ?

Dalam konteks Diskominfo sebagai OPD yang membantu Bupati Kudus dalam urusan komunikasi dan informasi, maka Diskominfo memastikan agar setiap kebijakan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal dan saluran yang telah disebutkan sebelumnya. Diskominfo kemudian juga menjadi sarana bagi masyarakat dalam penyampaian keluhan yang kemudian akan diteruskan kepada Bupati Kudus dan segenap jajarannya agar keluhan tersebut dapat segera ditangani.

42. Bagaimana memfasilitasi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait COVID kepada jajaran pemerintah/pengambil keputusan ?

Melalui banyak jalur, daring maupun luring. Bisa disampaikan melalui media sosial pemkab, saluran aspirasi DPRD, ormas/lsm, maupun aparat pemerintah di berbagai level yang ada di Kabupaten Kudus. Selain itu masyarakat mendapat banyak pilihan layanan pengaduan yang dapat disampaikan melalui SIMPONI Kudus, LapoGub, dan SP4n Lapor!

43. Apa saja aspirasi masyarakat yang masuk terkait COVID?

Masalah-masalah seperti pelanggaran terhadap proses, ketersediaan tempat tidur di RS, ketersediaan tabung oksigen, ketersediaan vaksin, dll.

44. Bagaimana upaya Diskominfo agar masyarakat bisa mengakses informasi yang disampaikan ?

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, melalui berbagai kanal baik daring maupun luring.

45. Apakah Diskominfo sudah memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat terkait Covid ? apa dasarnya ?

Ya, setiap kebijakan maupun perkembangan terkait penanganan COVID-19 selalu disampaikan oleh Diskominfo Kudus kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini terabadikan di lini masa media sosial milik Pemkab Kudus.

46. Bagaimana puncak pimpinan operasional bertanggungjawab mengenai berbagai aktivitas kehumasan selama Covid ?

Pimpinan bertanggungjawab secara penuh terhadap semua aktivitas penyaluran informasi penanganan COVID-19.

47. Bagaimana manajemen memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil pejabat humas terkait Covid ?

Manajemen (dalam hal ini pimpinan) bertugas membimbing dan mengarahkan pejabat humas dan bertanggungjawab penuh sebagai pejabat tertinggi yang memimpin pelaksanaan kegiatan tersebut.

48. Dalam membuat program, kebijakan atau berbagai aktivitas, apakah Diskominfo/Pemkab memikirkan objektivitas jangka panjang ?

Tentunya, oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil bebas dikritik oleh setiap pihak.

49. Bagaimana tindakan masyarakat terkait protokol kesehatan ? apakah sebagian besar tidak taat protokol kesehatan seperti masih ada aktivitas berkerumun, dll. atau bagaimana ?

Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pasang surut sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19. Ketika kasus melandai, masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan. Di situlah tugas Diskominfo Kudus untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir.

50. Apa tindakan Pemkab bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan atau tidak mengikuti anjuran pemerintah ? apa saja bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan masyarakat ?

Pemkab Kudus telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pengekan Hukum Protokol Kesehatan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai dari teguran lisan, sanksi administrative sampai pada denda. Contoh kasus tidak disiplin memakai masker, gelaran hajatan di tengah PPKM.

51. Bagaimana Pemkab/Diskominfo mengajak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut ? Pesan-pesan apa yang disampaikan ?

Pertama dengan pendekatan persuasif melalui penyampaian informasi, data dan fakta yang terjadi selama pandemi. Tetapi ketika masih membandel dan protokol kesehatan terus dilanggar, perlu diambil langkah tegas dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

52. Apakah Diskominfo pernah menemukan disinformasi di masyarakat terkait COVID ? Jika ada apa saja dan bagaimana Diskominfo mendapatkan informasi tersebut ?

Tentunya, seperti isu bahwa COVID-19 tidak ada, atau vaksin haram. Informasi ini viral baik di media sosial maupun dari percakapan umum sehingga cukup mudah mendapatkan informasi tersebut.

53. Bagaimana Diskominfo meluruskan/mengatasi disinformasi di masyarakat ?

Dengan memberikan informasi dan data faktual, melibatkan para ahli dan tokoh masyarakat yang berpengaruh.

54. Informasi yang beredar semasa COVID tidak jarang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Apakah hal itu terpetakan di masyarakat Kudus? Apa upaya Pemkab Kudus mengatasi hal tersebut ?

Ya, dan Diskominfo Kudus bekerjasama dengan berbagai stakeholder terus mengampanyekan pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat yang berpendapat sebaliknya akibat dari hoaks dan disinformasi yang ia peroleh dari sumber-sumber tidak bertanggungjawab.

55. Apakah Diskominfo melakukan komunikasi/pendampingan dengan pasien yang terkonfirmasi positif ? jika iya bagaimana ?

Tidak.

56. Apakah Diskominfo melakukan komunikasi/pendampingan dengan pasien pasca sembuh ? jika iya bagaimana ?

Tidak.

Dinas/Instansi : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**
Nama : **Rifqi Dzil Fahmi**
Jabatan : **Staf Pranata Humas**

1) Apa saja peran dari humas pemda Kudus dalam penanganan Covid-19 ?

Sebagai jembatan komunikasi saat krisis pandemic, menjadi pusat penyebaran informasi. Masyarakat mencari informasi melihat di medsos pemkab. Kami selalu aktif memberika info terkait pertambah kasus, info vaksinasi, bekerjasama dengan pihak-piha terkait

2) Apa isu yang beredar di masyarakat Kudus seputar Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan ?

Ada sebagian masyarakat yg kurang informasi, sehingga memunculkan sifat apatis. Tantanga pemka untuk mencerahka masy terkait Covid dan langkah2 yg harus dilakuka masyarakat untuk mengurangi penyebara covid. Masy mula tergera melalui penyebaran infformasi.

Isu : megaproyek dari pemodal internasional, kehalalan vaksin, efek samping vaksin. Sekarang sudah tidak ada isu tersebut

3) Apa upaya dari humas pemkab Kudus untuk mengetahui isu-isu tersebut ?

Banyak kanal yg bias digunakan mas untuk menyuarakan pertanyaan, kritik, da keluhan. Kanal resmi: Simponi, SP4N, laporgrup yg bias digunaka masy menayaka isu2 Covid. Kanal yg tidak resmi : lapora personel, hubunga personal internal dengan OPD lain.

Mula dari bawah, struktur pemerintahan RT, RW sampai pusat. Bupati menginstruksika bawahan untuk aktif mengumpulka keluha dari masy. Bupati secara langsung menghimbau untuk dibentuk Satgas Jogo Tonggo. Diskominfo menjadi salah satu bagian dari Satgas Jogo Tonggo. Satgas dengan diskom berbeda organisai, tapi saling bersinergi. Satgas diinstruksika dari pemerintah pusat – Gubernur - Bupati

4) Bagaimana strategi yang dilakukan pemda Kudus untuk menekan kepanikan masyarakat ?

Terus melakukan penyebara informasi berdasarkan data dan fakta yang benar, seperti dinas kesehatan, satgas Covid, pemkab, kemenkes, dan banyak lembaga lain.

Peran diskominfo lebih banyak ke penyebaran informasi da dokumentasi

5) Bagaimana situasi terkini yang dihadapi oleh pemda Kudus ?

Semenjak varian Omicron, kebutuha info terkait perkembanga Omicron masy semakin meningkat. Kominfo kembali aktif enyebarduaska informasi terkait kasus aktif, semain gencar mengampanyeka prokes. Saat ini mas lebih focus ke Omicron

6) Apa saja tujuan yang ingin dicapai dari rangkaian aktivitas komunikasi publik ?

Mencerahkan atau memberika info yang atual kepada masy denga tujuan agar kondisi di masyarakat lebih teratur, tidak ada misinformasi atau hoaks

7) Apa saja bentuk komunikasi publik dari humas pemkab Kudus dalam penanganan Covid-19 ?

Melalui sosial media: facebook, Twitter, Instagram. Sosmed pemkab juga dipegang oleh diskominfo. Ada pendekatan kepada tokoh agama seperti Kyai, pendeta (terkat apakah itu menjadi diskominfo masih krag paham).

Secara langsung : baliho, Saat Delta parah, kominfo bersama beberapa piha (polisi, TNI) bersinergi melakukan penyebaran informasi dengan berkeliling langsung menggunakan mobil dan speaker disertai penyemprotan. Diskominfo yang terjun ke lapangan.

8) Bagaimana strategi (cara mengelola) untuk setiap komunikasi publik yang dijalankan ?

- Sosial media : terdapat informasi rutin (kasus aktif) dan situasional, ada juga komunikasi yg sponta karena kejadia tida terduga, missal terjadi kerumunan atau sidak. Yang pegag sosmed

bagia komunikasi, admin tiap sosmed berbeda-beda. Satu platform satu orang, tapi juga bias diakses oleh pimpina seluruh pejabat structural (kadinan, kaidang). Semua sosmed cara pengelolaannya sama. Isu terkat Covid da aktifitas bupati selalu di update di semua sosmed, juga berita penting seperti vaksinasi, pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang mengadakan dinas tenaga kerja (disnaker perinkop UKM), bukan ranah diskominfo. Dari sisi monitoring, kami menyadari bahwa proses interaksi sosmed tida berhenti saat memposting sesuatu. Kami selalu melakuka monitoring, analisis social media: seberapa banya jangkauan, like, dan isi komentar di data. Analisis data dilakuka rutin setiap hari Sabtu-Kamis, Kamis direkap keluhan, kritik, pertanyaan masy yang tidak bias secara langsung ditangani. Kamis sore atau Jum'at pagi diserahkan kepada Bupati mana yg bisa ditindaklanjuti secara langsung.

- Baliho : kepemilika akses baliho terpenca, kami tida bisa secara langsung memasang baliho di sembarang tempat. Beberapa bulan ini terjadi pengalihan aset yg mempermudah. Kebutuha baliho biasanya untuk kegiatan kabupaten. Beberapa titik krusial seperti di alun2. Izin pemasangan baliho berdasarka diskominfo. Baliho diizinkan selama mengandung kegiatan pemkab dan krusial untuk diinformasikan, terbuka untuk lembaga manapun. Izin procedural biasanya piha terkat berkomunikasi dg diskominfo mengirimka surat pengantar kegiatan pemasangan baliho.

- Keliling : satgas Covid pusat (nasional) turun ke Kudus, ada juga panglima TNI Adi Cahyanto, dan Kapolri melihat kondisi Kudus, melauka rapat bersaapiha terkat seperti pemprov, pemkab, merumuska kegiatan upaya penagana penyebaran Covid. Kami sepakat bahwabutuh sosialisasi secara langsung. Koordinasi atarlembaga, menyusun jadwal desa mana yg aka dilakukan sosialisasi (seluruh desa), menampilka personel, menyiapka keperluan teknis. 1 hari cover 1 kecamatan. Program tersebut berjalan sampai sebulan an, saat kasus meledak. Dari Juni-Juli.

9) Bagaimana pemahaman dari personel humas pemkab Kudus mengenai urgensi dan praktek komunikasi publik ?

Untuk melakuka standarisasi agak sulit. Tapi kai semua meyakini bahwakomunikasi krusial dala proses pemerintahan, bahwakomunikasi menjadi kunci dari efektifitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan yg paling penting diskominfo sudah menyadari bahwapraktek2 komunikasi yg sifatnya satu arah dari atas ke bawah sudah using, yg bagus adalah komunikasi timbal balik yg lebih efektif dala menjawab permasalahann di massyarakat.

10) topik apa yang diangkat dalam narasi komunikasi publik pemkab Kudus terkait Covid-19?

Bagaimana mas dan pemerintah bekerja sama mengakhiri situasi pandemic demi kebagnita ekonomi masy. Hal tersebut terus dikampanyeka oleh Bupati

11) Metode evaluasi apa yang digunakan dalam aktivitas komunikasi publik ?

dalam prateknya biasanya ada evaluasi bulana, permorma media social. Kai melihat seberapa jauh jangkauan, interaksi yg sudah dilakukan sebulan terahir. Dari evaluasi tersebut kai melaukan catatan. Missal tentang vaksinasi ternyata mendapat banya komentar, nati kami aka memperbanya informasi terkait vaksinasi. Bekerja sama dengan Indonesia Indikator, lembaga konsulta komunikasi yg berpusat di Jkt, bekerjasama melauka analisis pemberitaan. Setiap hari teman2 mengumpulkan berita di surat kabar, di scan dan dikirmkan kepada Idn Indikator untuk dianalisis, biasanya paling lama seminggu.

Sedang berusaha menggunakan batuan (social media analysis tools), alat penganalisa medsos, tapi belum berjalan.

12) Adakah figur-figur tertentu yang dijadikan sebagai komunikator dalam komunikasi publik ?

tidak ada secara khusus. Bupati selalu terdepan. Bupati juga menggandeng beberapa tokoh ada pemuka agama.

13) Pertimbangan apa yang digunakan dalam menjadikan figur tersebut sebagai komunikator ?

karena figure pa bupati sebaga kepala daerah, pimpinan tertinggi di jajara pemerintahan. Beliau paling memiliki kepantasan, kecakapan mewakili pemerintah kabupaten Kudus dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

14) Bagaimana strategi humas pemda Kudus dalam menangkal hoaks seputar Covid-19 ?

Bekerjasama denga banyak media yang terdaftar di dewan pers (PWI dan IJTI) dengan intens dengan wartawan baik konvensional dan TV di Kudus. Tim dari kami secara khusus melakukan pemantauan komentar terlebih yg mengandung hoaks, biasanya akan dibalas langsung oleh admin dengan mencantumkan berita factual.

Untuk hoaks yg terlajur menyebar, biasanya kami kerahkan staf untuk monitoring. Berkoordinasi dengan admin terkait untuk menghapus berita hoaks. Kami melakukan screenshot percakapan yg mengandung hoaks, kai tampilka dan mengklarifikasi berita yg sebenarnya ditaruh di sosmed.

15) Apa strategi dari humas pemkab Kudus dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait vaksinasi ?

Lebih banya tugas utama di dinkes. Diskominfo lebih ke penyebaran info penyelenggaraan vaksinasi, pro kontra vaksin. Hal yg situasional biasanya lebih banyak ditangani oleh dinas kesehatan. Dalam program percepatan vaksinasi yg dikeluarkan oleh masy, dinkes harus datang ke lokasi untuk melakukan klarifikasi terkait pro kontra vaksin.

Diskominfo lebih ke menyajika berita atau konten fakktual. Setiap hari bersinergi dg dinkes, seperti terkait data perkembangan covid

16) Apa tindakan tegas dari pemda agar masyarakat patuh dalam melakukan vaksinasi ?

Lebih ke himbauan. Di Kudus, capaian vaksinasi sudah cukup tinggi saat ini. Tidak ada sanksi terhadap masy yg tidak mau vaksin

17) Dalam melakukan sosialisasi vaksin Covid-19, apakah pemda menemukan perdebatan dengan masyarakat ?

Iya, masalah halal/haram, efek samping. Menjadi tantangan bagaimana menjelaskan kpd masy. Strategi : memperlihatkan ke masy melalui sosmed dimana jajaran org penting di Kudus mau di vaksin seperti Bupati, tokoh agama, ketua DPRD, Kapolres Kudus, Pak Dandim (Komandan militer Kudus), Kepala kejaksaan Kudus, kepala pengadilan negeri Kudus.

18) Bagaimana pemda menyusun narasi sosialisasi vaksin agar tidak kontradiktif ?

Tida terlalu banyak ber narasi. Narasi sudah dibangun di pusat (RI). Narasi tersebut sedikit di modif menyesuaikan kondisi di masy. Seperti melibatkan tokoh agama.

19) Bagaimana peran humas pemda online di masa pandemi terkait vaksinasi ?

Lebih banyak ditangani ke baian informatika. Platform yg digunakan diskom lebih ke sosmed. Kai sesuai arahan dari pusat (RI) yg bias terverifikasi kebenarannya kepada masy. Kai tetap memberitaka melalui website. Warga lebih tertarik akses ke social media. Website cenderung satu arah.

20) Apa indikator keberhasilan dari kemudahan akses website dan sosial media lain yang digunakan ?

jumlah followers/teman, jumlah view, jumlah interaksi, like, komen positif (kinerja kai diapresiasi), komen negative (ada yg harus kami tinda lanjuti), yang digunakan sebagai dasar mengukur performa sosmed.

Website : sesua tugas dan fungsi memberitakan da di arsipkan di website. Selama tugas terlaksana dengan baik maka dijadikan indicator keberhasilan. Kolom aduan website ada banyak. Kolom adua difungsika secara umum nisa juga kritik tentang website dan tentang covid.

21) Seberapa efektif pemanfaatan website online pemda dalam melakukan sosialisasi vaksin ?

Melihat antusias warga terkait vaksin, sosmed menjadi alat yg efektif. Untuk website karena sifatnya satu arah, dan nada kolom aduan di website, warga menganggap website terlalu birokratif. Website kurang efektif

22) Bagaimana strategi dari humas pemda Kudus dalam mencapai indikator keberhasilan dari kemudahan akses website dan sosial media lain yang digunakan ?

sosmed : kami menyadari timing (kecepatan penyajian berita) menjadi penting. Awalnya kendalanya ada dalam alur screening. Kini, diskom memperbanyak staf yg melauka screening. Dulu, target kecepatan berita 30 mnt setelah draft jadi, kini menjadi lebih cepat 10 mnt setelah draft jadi. Target dengan situasi yg sedang terjadi, menggunakan foto dan video. Video memanfaatkan waktu lama karena perlu proses editing. Untuk foto dan news bias 30 mnt setelah kejadian sudah termasuk screening. Kegiatan peliputa lebih banyak ditangani tenaga kontrak, terdapat 3 orang dalam tim (fotografer, videographer, news)

23) Konten apa yang diberikan dalam masing-masing media ?

Staf diminta sebanyak mungkin mengambil foto dan video. Tidak ada kriteria khusus di tiap sosmed. Hanya modifikasi kecil.

Masyarakat lebih aktif Instagram (remaja) dan Facebook (general), Twitter tidak terlalu aktif

24) Bagaimana cara mengelola media yang digunakan ?

melakukan pengecekan terhadap admin yg bertugas mengupload konten yang sudah di acc oleh bidang komunikasi

25) Pertimbangan apa yang digunakan untuk mengelola media ?

kami transparansi bahwa apapun beritanya kami sampaikan transparansi, sesuai dg keadaan yg sesungguhnya. Dan akurasi berita

26) Lembaga apa saja yang digandeng oleh Diskominfo terkait krisis pandemic Covid-19 ?

lebih ke Pemkab. Dinkes, instansi luar seperti Polri dan TNI, BPPD, Dinas Pariwisata, Dinas perdagangan.

27) Bagaimana pemda Kudus melakukan pengorganisasian dengan lembaga terkait ?

mengikuti arahan Bupati. Aka ada rapat pimpinan, kemudian aka diteruskan ke jajaran2 dibawah. Pemda mengikuti sepenuhnya arahan dari Bupati

28) Bagaimana strategi dari humas Pemkab Kudus agar pesan yang disampaikan oleh komunikator komunikasi publik terkait Covid-19 dapat serasi ?

Ada beberapa langkah teknis, contoh : jumlah kasus aktif. Pemberitaan dilakukan di masing2 lembaga. Diawali dengan rapat, kemudian data yang akan disebar jadi satu sumber

29) Apa harapan dari Diskominfo terkait perilaku masyarakat dalam mengikuti anjuran dari pemerintah ?

Masyarakat bias mengikuti pelatihan yg diadakan kementerian, masyarakat lebih dewasa dalam ber sosmed, dengan kejujuran, tata karma, agar iklim sosmed lebih sehat. Tidak dipenuhi ujaran kebencian.